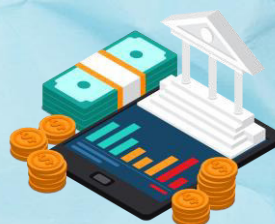




MUBA MAJU !
LEBIH CEPAT !

LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2024**



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Sekayu, 17 Februari 2025

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



MIRWAN SUSANTO, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19751029 200003 1 002



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan taun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diukur atas dasar [penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja tujuan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa penyesuaian terhadap indikator kinerja sebelumnya dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama disesuaikan kembali menjadi 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 399/KPTS-SETDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini, diharapkan



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024**

diharapkan

dapat mengoptimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bupati Musi Banyuasin

H. M. TOHA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemetintah Kabupaten Musi banyuasin tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Tujuan strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja utama dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka ditetapkan fokus dan tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”** dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Lokal;
3. Pemenuhan Fasilitasi Sarana Prasarana Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan;
4. Optimalisasi Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Diversifikasi Ekonomi;
5. Percepatan Legalitas Kepemilikan Lahan Petani;
6. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas;
7. Pemenuhan Kebutuhan RTH Perkotaan di Tiap Kecamatan;
8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Berbasis Satu Data Muba;
9. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Berbasis Satu Data Muba;
10. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Disertai Percepatan Implementasi Satu Data Muba;
11. Penyederhanaan Birokrasi Layanan Publik.

Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Tujuan Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan	%	14,90	14,35	12,88 %	110,24 %
	2. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,27	4,00-4,50	4,94	109,77%
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	59,37	91,15	80,55	88,37%
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,17	69,17	72,27	104,48%
Terwujudnya Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC	BB	122,48%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebesar 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.754.985.496.957,10 atau sebesar 72,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.743.519.048.507,58,-.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran umum Kabupaten Musi Banyuasin	I-2
1.3 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	I-5
1.4 Profil Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	I-15
1.5 Isu Strategis	I-18
1.6 Maksud dan Tujuan	I-21
1.7 Strategi dan Arah Kebijakan	I-21
1.8 Sistematika Penulisan	I-22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 II-1
2.1 Perencanaan Strategi	II-2
2.2 Sasaran	II-5
2.3 Tema Pembangunan	II-11
2.4 Program Prioritas	II-12
2.5 Indikator Kinerja Utama	II-14
2.6 Perjanjian Kinerja	II-19
2.7 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024	..II-19
2.8 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-28
2.9 Prioritas Pembangunan Tahun 2024	II-38
2.10 Perencanaan Kinerja	II-39
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 III-1
3.1 Latar Belakang	III-1
3.2 Analisis Capaian Kinerja	III-2
3.1.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	III-3
3.1.2 Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	III-65
3.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	III-79



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

3.3 Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber	
Daya	III- 107
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	III- 108
3.5 Realisasi Anggaran	III- 110
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan akuntabilitas instansi Pemerintah dalam menjalankan kinerja Pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab (akuntabel) merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya Pemerintahan yang bersih, tertib, berkeadilan dan tegaknya supremasi hukum dalam tata kelola Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, maka dituntut kerja keras dan keseriusan penyelenggara Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 merupakan capaian kinerja tahun ke-2 (dua) dari RPD priode 2023-2026. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem evaluasi masing-masing unit organisasi dalam jajaran



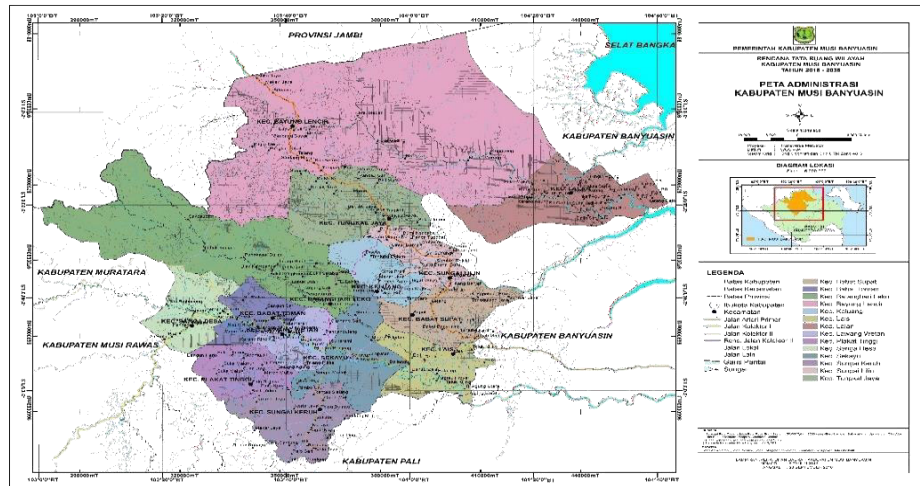
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan sekaligus merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi manajerial dan administratif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di turunkan dengan Peraturan Bupati No 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapor Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, maka penyajian informasi pelaporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini difokuskan pada penjabaran atas capaian kinerja dalam periode satu tahun dengan memperhatikan indikator kinerja utama dan prioritas pembangunan tahun yang bersangkutan.

Demikian pula pada analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pelaporan kinerja ini didasarkan atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang dimungkinkan mempengaruhi capaian, permasalahan dan kendala yang ada.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sebagai Kabupaten yang terluas ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Kabupaten merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 (lima belas) persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, terbagi atas 15 wilayah Kecamatan dan 230 Desa dan 13 Kelurahan. Dari 15 Kecamatan tersebut kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki Desa/Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dimana jumlah Desa terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Lalan yaitu berjumlah 27 Desa/Kelurahan. Sedangkan Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Bayung Lencir dengan wilayah seluas 4.847 km² atau sekitar 33,98% dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Lawang Wetan dengan wilayah seluas 232 km² atau sekitar 1,63% dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Gambaran peta wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1****Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin**

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 – 2031

Batas Geografis:

Kabupaten Musi Banyuasin secara administrasi terletak di Provinsi Sumatera Selatan berda pada ketinggian 20-140 meter di atas permukaan air laut (dpl). Terbentang dari 01° 18' 00" sampai dengan 4° 00'00" Lintang Selatan dan 103° 00'00" sampai dengan 105° 40'00" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai topografi lahan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan kemiringan lahan, yaitu dataran rendah, bergelombang, dan berbukit. Sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di Daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa- rawa dan payau yang



dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 meter di atas permukaan laut.

Penyiapan data dan informasi dalam gambaran umum kondisi Daerah ini merupakan data yang dikelola dan diolah dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel 1.1.

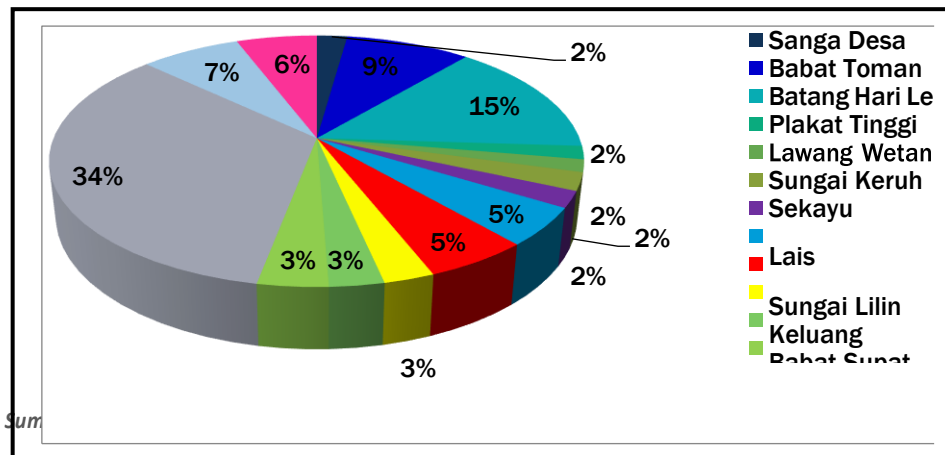
Tabel 1.1**Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin**

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah terhadap total (%)
1	Sanga Desa	317,00	2,22
2	Babat Toman	1.291,00	9,05
3	Batang Hari Leko	2.107,79	14,77
4	Plakat Tinggi	247,00	1,73
5	Lawang Wetan	232,00	1,63
6	Sungai Keruh	391,00	2,74
7	Sekayu	701,60	4,92
8	Lais	755,53	5,30
9	Sungai Lilin	374,26	2,62
10	Keluang	400,57	2,81
11	Babat Supat	511,02	3,58
12	Bayung Lencir	4.847,00	33,98
13	Lalan	1.031,00	7,23
14	Tungkal Jaya	821,19	5,76
15	Jirak Jaya	238,00	1,67
Jumlah		14.265,96	100

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024

**Gambar 1.2**

**Persentase Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan**



1.3. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan nomenklatur maupun tugas pokok dan fungsinya. Daftar nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
1	2		3	
I	SEKRETARIAT		SEKRETARIAT	
	a	Sekretaris Daerah	a	Sekretaris Daerah
	b	Staf Ahli Bidang :	b	Staf Ahli Bidang :
	1.	Hukum, Politik dan Pemerintahan	1.	Hukum, Politik dan Pemerintahan



NO	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
1	2	3		
	2.	Pembangunan	2.	Pembangunan
	3.	Keuangan	3.	Keuangan
	c	Asisten Bidang :	c	Asisten Bidang :
	1.	Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat	1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.	Perekonomian dan Pembangunan
	3.	Administrasi Umum	3.	Administrasi Umum
	d	Bagian	d	Bagian
	1.	Bagian Tata Pemerintahan	1.	Bagian Tata Pemerintahan
	2.	Bagian Protokol	2.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
	3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.	Bagian Penyelesaian Perbatasan	4.	Bagian Sumber Daya Alam
	5.	Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	5.	Bagian Administrasi Pembangunan
	6.	Bagian Umum dan Pengadaan	6.	Bagian Umum
	7.	Bagian Telek dan Sandi	7.	Bagian Kerjasama
	8.	Bagian Hukum	8.	Bagian Hukum
	9.	Bagian Organisasi	9.	Bagian Organisasi
	10.	Bagian Keuangan	10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	11.	Bagian Hubungan Masyarakat	11.	Bagian Perekonomian
			12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
II	SEKRETARIAT DPRD		SEKRETARIAT DPRD	



NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
III		INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	
IV		DINAS DAERAH :		DINAS DAERAH :	
		1.	Dinas Pendidikan Nasional	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Dinas Kesehatan	2.	Dinas Kesehatan
		3.	Dinas PU Bina Marga	3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.	Dinas Sosial	4.	Dinas Sosial
		5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.	Dinas Komunikasi dan Informatika
		7.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	7.	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
		8.	Dinas Perikanan	8.	Dinas Perikanan
		9.	Dinas Pertanian dan Peternakan	9.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		10.	Dinas Perkebunan	10.	Dinas Perkebunan
		11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
		13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar	13.	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah
		14.	Dinas PU Cipta Karya	14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		15.	Dinas Kehutanan	15.	Dinas Perhubungan
		16.	Dinas Pertambangan dan Energi	16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
		17.	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	17.	Dinas Lingkungan Hidup
		18.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.	Dinas Ketahanan Pangan
				19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
V	LEMBAGA TEKNIS DAERAH / BADAN			LEMBAGA TEKNIS DAERAH / BADAN	
		1.	BAPPEDA	1.	BAPPEDA
		2.	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5.	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		6.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	6.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
		7.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	7.	RSUD
		8.	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal		
		9.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
		10.	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan		
		11.	Badan Ketahanan Pangan		
		12.	RSUD		
VI	SATUAN:			SATUAN:	
		1.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Satuan Polisi Pamong Praja
VII	KANTOR:			SATUAN:	
		1.	Kantor Layanan Pengadaan	1.	-
		2.	Kantor Perwakilan	2.	-
IX	KECAMATAN :			KECAMATAN :	
		1.	Kecamatan Sekayu	1.	Kecamatan Sekayu
		2.	Kecamatan Sungai Keruh	2.	Kecamatan Sungai Keruh
		3.	Kecamatan Babat Toman	3.	Kecamatan Babat Toman
		4.	Kecamatan Lawang Wetan	4.	Kecamatan Lawang Wetan
		5.	Kecamatan Plakat Tinggi	5.	Kecamatan Plakat Tinggi
		6.	Kecamatan Batanghari Leko	6.	Kecamatan Batanghari Leko
		7.	Kecamatan Keluang	7.	Kecamatan Keluang
		8.	Kecamatan Lais	8.	Kecamatan Lais
		9.	Kecamatan Sanga Desa	9.	Kecamatan Sanga Desa



NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
		10.	Kecamatan Sungai Lilin	10.	Kecamatan Sungai Lilin
		11.	Kecamatan Babat Supat	11.	Kecamatan Babat Supat
		12.	Kecamatan Tungkalsari	12.	Kecamatan Tungkalsari

		13. Kecamatan Bayung Lencir		13. Kecamatan Bayung Lencir	
		14.	Kecamatan Lalan	14.	Kecamatan Lalan
		15.	Kecamatan Jirak Jaya	15.	Kecamatan Jirak Jaya
		X KELURAHAN :		X KELURAHAN :	
		1.	Kelurahan Kayuara	1.	Kelurahan Kayuara
		2.	Kelurahan Serasan Jaya	2.	Kelurahan Serasan Jaya
		3.	Kelurahan Soak Baru	3.	Kelurahan Soak Baru
		4.	Kelurahan Balai Agung	4.	Kelurahan Balai Agung
		5.	Kelurahan Babat	5.	Kelurahan Babat
		6.	Kelurahan Mangun Jaya	6.	Kelurahan Mangun Jaya
		7.	Kelurahan Sungai Lilin	7.	Kelurahan Sungai Lilin
		8.	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	8.	Kelurahan Sungai Lilin Jaya
		9.	Kelurahan Bayung Lencir	9.	Kelurahan Bayung Lencir
		10.	Kelurahan Bayung Lencir Indah	10.	Kelurahan Bayung Lencir Indah
		11.	Kelurahan Ngulak I	11.	Kelurahan Ngulak I
		12.	Kelurahan Ngulak	12.	Kelurahan Ngulak
		13.	Kelurahan Keluang	13.	Kelurahan Keluang

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin 2024



Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
- e. Perumusan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- f. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan arah kebijakan berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- g. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Sekretariat Daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat Daerah;
- i. Pengendali dan pengarah pelaksanaan tugas lingkup para asisten dan staf ahli;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Inspektorat, Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, agar sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten meliputi Sekretariat Daerah dan DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;



- l. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- m. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan Pemerintahan Daerah;
- n. Pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- o. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kabupaten dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- p. Pengendali administrasi keuangan dan aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Pemahaman dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- t. Pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- w. Pelayanan administrasi dan pembinaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah

2. Sekretariat DPRD

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretariat DPRD



mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

3. Inspektorat Daerah

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan.

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Badan Daerah

Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan, tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kecamatan

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian wilayah;
- d. Pembimbingan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pembimbingan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. Pembimbingan pembangunan sosial;
- g. Pemberi petunjuk keagrariaan;
- h. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan
- i. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program.



7. Kelurahan

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 86 Tahun 2016 melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Pembimbingan dan pengkoordinasian wilayah;
- e. Pembimbingan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. Pembimbingan pembangunan yang meliputi pembinaan sosial;
- g. Pembimbingan keagrariaan;
- h. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan
- i. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program.

1.4. PROFIL PEGAWAI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 20 Desember 2024 adalah 6.032 orang yang terdiri dari 560 orang Pejabat Eselon, 934 orang JFT Kesehatan, 2664 orang JFT Pendidikan, 519 JFT lainnya, dan 1348 orang JFU. Masing-masing struktural dan fungsional tersebut dibagi menurut golongan, jenis kelamin, pendidikan dan usia dengan rincian sebagai berikut



Tabel 1.4
Jumlah ASN menurut Jenis Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Pejabat Struktural	560
a. Eselon	560
Fungsional	5.465
a. JFT Kesehatan	934
b. JFT Pendidikan	2664
c. JFT Lainnya	519
d. JFU	1348
TOTAL	6.032

Dari 560 orang Pejabat Eselon, jumlah terbesar ASN Struktural menurut golongan adalah golongan IV/a sebanyak 220 orang , jumlah terkecil adalah golongan II/a sebanyak 1 orang. Data Aparatur Sipil Negara Struktural menurut golongan ruang secara rinci sebagai berikut:

No.	JABATAN (ESELON)	JUMLAH
1	2 A	1
2	2 B	29
3	3 A	66
4	3 B	132
5	4 A	220
6	4 B	112
TOTAL		560

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2024

Menurut jenis kelamin, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi memiliki jumlah laki-perempuan banyak dari laki-laki. Jumlah ASN menurut jenis kelamin, sebagai berikut :

No.	Golongan	Pria	Wanita
1	IV/d	2	
2	IV/c	32	19
3	IV/b	282	320
4	IV/a	284	288
5	III/d	598	1012
6	III/c	356	639
7	III/b	351	757
8	III/a	221	329
9	II/d	133	123
10	II/c	95	75
11	II/b	44	24
12	II/a	17	9



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

No.	Golongan	Pria	Wanita
13	I/d	13	1
14	I/c	6	
15	I/b	2	
TOTAL		2436	3596

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas Aparatur Sipil Negara berpendidikan Strata II sebanyak 1109 orang dan minoritas berpendidikan Strata III sebanyak 3 orang. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

No.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	S3	3
2	S2	1109
3	S1	3501
4	D4	75
5	D3	713
6	D2	39
7	D1	10
8	SMA	548
9	SMP	28
10	SD	6
TOTAL		6.032



1.5. ISU STRATEGIS

Sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Daerah harus memperhatikan berbagai kebijakan, peraturan dan situasi serta kondisi aktual dan isu-isu strategis lainnya, baik dalam skala nasional maupun skala regional.

Dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta Tema pembangunan Kabupaten MUBA Tahun 2024, yaitu **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”**.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin selain untuk mendorong terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, juga memperhatikan keselarasan program dengan urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga mendorong tercapainya arah kebijakan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, isu-isu yang timbul seyogyanya juga merupakan isu-isu dalam skala nasional dan regional, bahkan tidak menutup kemungkinan terkait dengan isu-isu internasional.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan agar fokus mencapai apa yang diinginkan. Selain itu, isu penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dalam tahun 2023-2026 adalah peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi general dan tematik serta digitalisasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi modern, peningkatan pengembangan infrastruktur dasar, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, pemerataan pembangunan antar kecamatan, pengembangan sektor hilir guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan, peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan peran dan generasi muda dan perempuan.



Upaya peningkatan pelayanan publik dan profesionalisme Aparatur terkait dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan peningkatan kompetensi Aparatur.

Terkait isu-isu strategis kabupaten Musi Banyuasin, maka isu-isu strategis yang paling menentukan dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. **Kemiskinan**

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan.

2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Namun, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti migas dan batu bara dapat menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi. Diperlukan strategi pengembangan sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

3. **Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran di Musi Banyuasin masih menjadi perhatian, terutama bagi angkatan kerja muda. Penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, minimnya pelatihan vokasional, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan pelatihan keterampilan berbasis industri dan penguatan program wirausaha bagi masyarakat melalui UMKM.

4. **Pendidikan**

Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan dengan masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya tingkat partisipasi sekolah,



kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan investasi di sektor pendidikan dan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dapat menjadi langkah strategis.

5. Kesehatan

Akses layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya tenaga medis, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan preventif. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran kesehatan, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat.

6. Infrastruktur Daerah

Infrastruktur jalan, transportasi, dan jaringan listrik masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi ini berdampak pada konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti deforestasi dan eksploitasi tambang, berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah industri dan pencemaran air masih menjadi tantangan utama. Diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi masih diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi pelayanan publik yang masih lambat, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan, serta tingkat korupsi yang masih perlu ditekan. Digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi solusi yang dapat diterapkan.



1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan program dan kegiatan pada periode yang akan datang.

1.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah – langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja Birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah, Sehingga dalam implementasi RPD ini tidak hanya melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki tantangan dan peluang kompleks kedepan.

Tabel 1.5
Keterkaitan Isu Strategi, Tujuan dan Sasaran

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1.	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan
	Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi		



NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
	Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian-Pemulihan pasca pandemi covid-19		Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 berdasarkan sistematika berikut ini:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR



BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.3 Profil Ekonomi Kabupten Musi Banyuasin
- 1.4 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.5 Profil Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.6 Isu Strategis
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Kinerja
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.4 Prioritas Pembangunan

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.2 Capaian Kinerja Lainnya
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Menindak lanjuti amanat undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang -undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang – undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilihan umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan bupati dan wakil bupati yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 atau di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Untuk Kabupaten Musi Banyuasin, dengan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati musu banyuasin periode 2017-2022 yang menandai berakhirnya pula RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2022 yang menandai berakhirnya RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Pada tahun 2023 ini sehingga di butuhkan dokumen transisi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan Tahun 2023 ini sehingga di butuhkan dokumen transisi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh Daerah pada masa transisi ini terdiri dari RPJPD, RPD, RKPD dan RENSTRA-PD. Masing -masing dokumen merupakan hirarki dokumen yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian disinkronisasikan dengan RPD masa transisi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Selanjutnya RPD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran



Sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kabupaten musu banyuasin. RPD ini juga sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 tahun. Rencana Pembangunan Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*Threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Daerah yang disusun mengandung tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Di samping itu juga dalam rangka



memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Dari penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah baik nasional maupun provinsi dan permasalahan serta isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut maka perlu dirumuskan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global;



3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur keberhasilan dalam empat tahun, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Adapun indikator masing-masing tujuan yang di sajikan pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
		Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B

Sumber: RPD Kab. Musi Banyuasin tahun 2023-2026



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini memiliki 3 tujuan utama seperti yang telah tertera di tabel 5.1 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator pencapaian tujuan, yaitu: Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara itu, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada Tahun 2026, diharapkan Angka Kemiskinan Kab. Muba sudah menurun menuju 13,35%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 3,45-5,00. Indeks pelayanan infrastruktur sudah membaik menjadi 93,37 pada tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkat pada tahun 2026 menjadi 70,78 dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi B.

2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Langkah-langkah penetapan sasaran pelayanan pemerintah daerah:

- a) Mereviu hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya;
- b) Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
- c) Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat daya saing daerah;



- d) Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan;

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah:

- 1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
- 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
- 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
- 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
- 5) Peningkatan kesejahteraan para petani;

Untuk mengukur kinerja sasaran digunakan indikator sasaran, indikator sasaran ditampilkan dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Daya beli dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.371	10.602	10.883	11.064	11.295
2.	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76



No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
	kerja terampil						
3.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan (ADHK)	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34
4.	Peningkatan Produktivitas sektor usaha mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (ADHK)	7,75	0,70	1,05	1,40	1,75
		Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (ADHK)	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82
5.	Peningkatan	Nilai Tukar	91,00	93,00	95,00	97,00	100,00



No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
	Kesejahteraan Para Petani	Petani					
6.	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	1) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	64,04%	68,62%	73,14 %	76,52 %	80,10 %
		2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	90,60%	95,20%	100%	100%	100%
		3) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	84,80%	92,50%	100%	100%	100%
		4) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	100%	78,97%	58,17 %	37,50 %	0%
7.	Peningkatan Kualiatas	Indeks Kualitas	65,01%	65,51%	66,01 %	66,29 %	66,72 %



No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
	Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup					
8.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,45	12,60	12,76	12,91	13,07
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91
9.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45
10.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB
		Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	92	92
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	3,1025	3,235	3,367 5	3,5

Tabel 2.3



Tabel 2.3
Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	- Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran - Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian - Pemulihan pasca pandemi covid-19	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik

2.3. Tema Pembangunan

Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka ditetapkan fokus dan tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tema Pembangunan Kabupaten Muba Tahun 2023 – 2026

No.	Tahun	Tema Pembangunan
1.	2023	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan
2.	2024	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
3.	2025	Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih



No.	Tahun	Tema Pembangunan
4.	2026	Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi

2.4. Program Prioritas

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJP dan RPD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPD yang disusun saat ini keselarasan sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode RPD yang akan menjadi prioritas atau target yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun program prioritas daerah tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1 (PD 1) : Meningkatkan Produktivitas Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Program Prioritas Daerah (PPD):

PPD 1 : Peningkatan legalitas kepemilikan lahan petani;

PPD 2 : Peningkatan produktivitas serta kualitas komoditas untuk Pemenuhan kebutuhan domestik dan hilirisasi;

PPD 3 : Optimalisasi pengembangan UMKM dan IKM;

PPD 4 : Peningkatan investasi dengan menjaga iklim investasi yang Kondusif serta promosi investasi yang efektif dan tepat sasaran.

2. Prioritas Daerah 2 (PD 2) : Meningkatkan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinan Ekstrem

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Penguatan perlindungan sosial;

PPD 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;



PPD 3 : Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui akses Pelayanan dasar.

3. Prioritas Daerah 3 (PD 3) : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan konektivitas pada daerah sentra ekonomi;

PPD 2 : Pembangunan dan peningkatan SPAM ;

PPD 3 : Pembangunan dan peningkatan system pengelolaan air limbah domestik;

PPD 4 : Peningkatan dan pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman;

PPD 5 : Peningkatan dan pengamanan sumber daya air.

4. Prioritas Daerah 4 (PD 4) : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan;

PPD 2 : Pencegahan kebakaran hutan;

PPD 3 : Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan;

PPD 4 : Penanggulangan bencana.

5. Prioritas Daerah 5 (PD 5) : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan Pendidikan yang berkualitas;

PPD 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;

PPD 3 : Peningkatan peran generasi muda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

PPD 4 : Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal.

**6. Prioritas Daerah 6 (PD 6) : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan publik berbasis digital;

PPD 2 : Peningkatan manajemen kinerja ASN dan akuntabilitas;

PPD 3 : Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target – target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkelanjutan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*selfassessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukutannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai



dengan tahun 2022 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

NO		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Daya beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	1. Angka Kemiskinan	%	15,05	14,35	13,85	13,35
		2. Indeks Gini	Indeks	0,306	0,296	0,286	0,276
		3. Pertumbuhan Ekonomi	%	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		4. Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp./Tahun	10.602	10.883	11.064	11.295
2.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Sebagai menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi	5. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	%	3,38	3,69	4,01	4,34



NO		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
3.	Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi	6. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	1,76	1,94	2,12	2,31
		7. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	%	0,7	1,05	1,40	1,75
		8. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	%	0,79	1,12	1,47	1,82
4.	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	9. Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	93,00	95,00	97,00	100,00
5.	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh Tenaga Kerja Terampil	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,8	3,65	3,5	3,35
		11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,71	70,03	70,38	70,76
6.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,17	69,17	70,25	70,78
		13. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,6	12,76	12,91	13,07
		14. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,8	7,86	7,91
7.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	15. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,08	69,2	69,33	69,45
8.	Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat	16. Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	85,44	91,15	92,17	93,37



NO		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
		17. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	68,62%	73,14%	77%	80%
		18. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	%	95,20%	100%	100%	100%
		19. Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang layak	%	92,50%	100%	100%	100%
		20. Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	%	78,97%	58,17%	38%	0%
9.	Peningkatan Kualiatas Lingkungan Hidup	21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,51%	66,01%	66%	67%
10.	Peningkatan Kualiatas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	22. Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB
		23. Opini BPK RI terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	24. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	CC	B
		25. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	92	92	92
		26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,1025	3,235	3,3675	3,5



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama. Tahapan yang telah dilakukan melalui sinkronisasi terhadap indikator makro yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan 26 Indikator Kinerja Utama menjadi 5 Indikator Kinerja Utama Makro Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 399/KPTS-SETDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Angka Kemiskinan	Persentase	15,05	14,35	13,85	13,35
		2) Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		3) Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	85,44	91,15	92,17	93,37
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,17	69,71	70,25	70,78
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	5) Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	CC	B



2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan pada tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja utama dan pada target yang akan dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Terdapat 3 (tiga) Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Indikator Kinerja Utama untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebelumnya berjumlah 26 Indikator dan telah dilakukan penyesuaian menjadi 5 indikator. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.7. PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan program-program yang akan menunjang pembangunan daerah dengan menerapkan sinergitas dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tema pembangunan tahun 2024. Program-Program tersebut dapat dilihat secara rinci bersamaan dengan anggaran pada tabel dibawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN				
No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1.	Angka Kemiskinan	14,35
		2.	Pertumbuhan Ekonomi	4,00-4,50
		3.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	91,15
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,71
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC



Tabel 2.6
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 1.416.667.000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 41.319.970.949
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 600.376.000
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 4.193.486.000
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 3.732.272.300
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 312.248.240
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 7.518.797.000
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.403.028.455
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 397.054.000
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 95.019.000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 369.581.769
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 450.000.000
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 3.727.437.425
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 619.353.950
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 45.230.604.527



No.	Program	Anggaran
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 2.848.893.000
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 517.599.600
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 665.682.000
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 367.406.000
20	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 1.020.405.721
21	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 2.473.309.487
22	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 372.000.000
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 83.244.889.523
24	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 5.749.963.962
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 16.843.846.317
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 28.249.631.470
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 1.140.035.500
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 530.483.500
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 1.483.837.300
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 82.342.168.086
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 847.163.000



No.	Program	Anggaran
32	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 350.000.000
33	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.292.478.050
34	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 1.265.891.660
35	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 453.703.800
36	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 10.857.116.118
37	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 898.439.425
38	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.195.998.610
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 30.267.331.848
40	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 10.450.022.000
41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 19.617.635.130
42	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 190.298.900
43	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 8.499.354.013
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 315.921.332.046
45	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 893.301.612
46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.142.296.000
47	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 74.524.930.618
48	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rp 249.991.712



No.	Program	Anggaran
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 5.522.186.433
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 1.178.016.000
51	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 62.026.000
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 16.890.000.000
53	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 4.459.751.200
54	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 694.384.750
55	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 200.000.000
56	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 29.723.207.325
57	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.635.590.000
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 3.289.231.472
59	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 5.808.189.500
60	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 15.400.000.000
61	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 198.590.081
62	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 3.033.872.380
63	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 299.897.600
64	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 13.929.071.994
65	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 97.705.000



No.	Program	Anggaran
66	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 1.270.934.516
67	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 456.736.000
68	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 140.187.000
69	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 1.574.425.800
70	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 2.484.577.000
71	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 199.999.900
72	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 3.375.394.183
73	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 878.832.000
74	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 8.658.156.909
75	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.578.753.221
76	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 658.643.100
77	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 81.350.258.580
78	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 37.055.150.030
79	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 16.849.706.516
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.697.646.187.769
81	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 2.289.740.630



No.	Program	Anggaran
82	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 8.788.992.901
83	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 19.765.031.339
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 497.310.639.911
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 16.361.677.823
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 9.989.355.804
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 3.630.000.000
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 4.051.246.600
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 1.937.041.243
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 1.321.029.056
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 4.722.670.160
92	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 7.118.453.959
93	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 300.000.000
94	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 5.687.676.726
95	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 3.267.543.910
96	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 2.434.129.109
97	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 424.469.100
98	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 3.670.808.000



No.	Program	Anggaran
99	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 56.350.000
100	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 71.184.687.572
101	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 23.874.972.000
102	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 1.900.000.000
103	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 631.160.000
104	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 5.063.649.910
105	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 150.000.000
106	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 378.717.000
107	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 536.168.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 3.482.599.205.635

**2.8. PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN				
No (1)	Tujuan (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1.	Angka Kemiskinan	13,85
		2.	Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75
		3.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,25
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC

**Tabel 2.7**

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.740.800.795.981
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 44.666.483.931
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 79.586.229.799
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 917.594.700
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 196.237.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 265.854.980
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 19.647.010.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 8.795.004.600
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 9.637.066.912
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 18.338.765.186
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 88.251.252.238
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 2.987.632.400
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 310.830.982.731



No.	Program	Anggaran	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	1.100.000.000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	5.890.000.000
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	7.885.133.450
17	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	19.710.000.000
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	50.683.086.756
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	2.484.450.710
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	6.503.822.111
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	4.998.389.000
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	13.279.506.370
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	2.115.216.700
24	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	47.387.063.521
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	1.177.715.000
26	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp	418.587.050
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	4.644.780.600



No.	Program	Anggaran	
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	978.035.525
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	743.103.000
30	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	934.046.550
31	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	272.961.246
32	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	156.533.000
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	492.805.500
34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	846.406.500
35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	3.741.363.738
36	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	81.902.388
37	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp	297.100.919
38	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	10.000.000.000
39	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	800.000.000
40	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	1.582.463.924
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	3.932.000.000



No.	Program	Anggaran
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 253.735.000
43	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 99.937.000
44	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 171.952.000
45	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 10.223.741.437
46	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 719.678.919
47	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 423.029.402
48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 6.213.532.523
49	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 108.176.708
50	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 138.223.000
51	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 9.083.060.286
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 3.556.272.774
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 165.807.867
54	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 1.916.400.001
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 491.655.320



No.	Program	Anggaran
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 21.697.160.492
57	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 2.700.177.050
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rp 88.860.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 8.890.472.742
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 7.063.709.082
61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 453.703.800
62	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 300.000.000
63	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 350.000.000
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 450.000.000
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 892.199.600
66	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 3.368.179.850
67	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 513.305.500
68	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 624.739.000
69	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.633.167.050
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 420.000.000



No.	Program	Anggaran
71	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 119.604.000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.678.028.500
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Rp 80.807.820.111
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 3.435.154.990
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 1.263.217.775
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 1.282.600.401
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 3.528.249.850
78	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 275.000.000
79	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 299.995.000
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 345.716.000
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 2.513.666.278
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 756.207.578
83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 2.837.260.350
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 2.278.464.756
85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 1.248.411.957



No.	Program	Anggaran
86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 1.730.000.150
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.319.020.000
88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.729.791.600
89	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 328.039.250
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 17.221.301.118
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 10.664.209.821
92	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 1.621.167.700
93	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 15.190.843.609
94	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 385.839.000
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 7.570.698.265
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 622.268.378
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 4.124.214.850
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 1.451.212.000
99	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 4.833.217.000



No.	Program	Anggaran
100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 372.898.040
101	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 131.511.050
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 3.003.180.057
103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 59.749.000
104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 235.629.000
105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 300.000.000
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 21.051.766.173
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 3.547.176.450
108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 38.736.777.649
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 3.190.149.781
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.498.428.750
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 511.017.096.808
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.171.453.529
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.795.600.000
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 7.294.300.550



No.	Program	Anggaran
115	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 975.589.524
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 3.599.999.200
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 1.500.000.800
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10.111.920.876
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 9.097.015.077
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 247.321.730
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 240.525.000
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 538.950.499
123	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 2.049.958.635
124	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 7.321.187.372
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 150.062.000
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 399.937.890
127	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 700.000.000
Jumlah Anggaran		Rp 3.408.867.666.146



2.9. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan konsistensi dan sinkroni sasi atas kerangka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Prioritas pembangunan berangkat dari suatu paradigma yang menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan strategis dalam tahun yang bersangkutan.

Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 adalah **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”**.

Adapun arah Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Lokal;
3. Pemenuhan Fasilitas sarana prasarana peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan;
4. Optimalisasi hilirisasi komoditas unggulan dan diversifikasi ekonomi;
5. Percepatan legalitas kepemilikan lahan petani;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar prioritas;
7. Pemenuhan kebutuhan RTH perkotaan di tiap kecamatan;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba;
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan berbasis satu data muba;
10. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik disertai percepatan implementasi satu data muba;
11. Penyederhanaan birokrasi layanan publik.

**2.10. PERENCANAAN KINERJA**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan *netto*) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 4.775.876.224.507; berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.654.239.641.897; Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 121.636.582.610; Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 24.950.000.000; dan Belanja Daerah sebesar Rp.4.750.926.224.507. dengan rincian alokasi anggaran belanja sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN BELANJA
APBD PERUBAHAN 2024**

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasi	2.977.667.797.595
Belanja Modal	1.233.172.084.375
Belanja Tidak Terduga	5.435.810.272
Belanja Transfer	534.650.532.265
Total Belanja	4.750.926.224.507

Sumber: **Perbup Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pergeseran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. LATAR BELAKANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Musi Banyuasin merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja utama tahun 2024 adalah sebesar **107,07%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 terhadap Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan	%	14,90	14,35	12,88 %	110,24 %
	2. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,27	4,00-4,50	4,94	109,77%
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	59,37	91,15	80,55	88,37%
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,17	69,17	72,27	104,48%
Terwujudnya Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC	BB	122,48%

Sumber: Kemenpan RB dan BAPPEDA Kab. Muba



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebesar 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Perbandingan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan
	2. Pertumbuhan Ekonomi
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia
Terwujudnya Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5. Indeks Reformasi Birokrasi



Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

- *Angka Kemiskinan*
- *Pertumbuhan Ekonomi*
- *Indeks Pelayanan Infrastruktur*



Capaian Indikator-indikator Tujuan Pembangunan "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif" Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3**Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin 1 Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	14,35 %	12,88 %	110,24 %
Pertumbuhan Ekonomi	4,00-4,50	4,94	109,77%
Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	80,55	88,37%

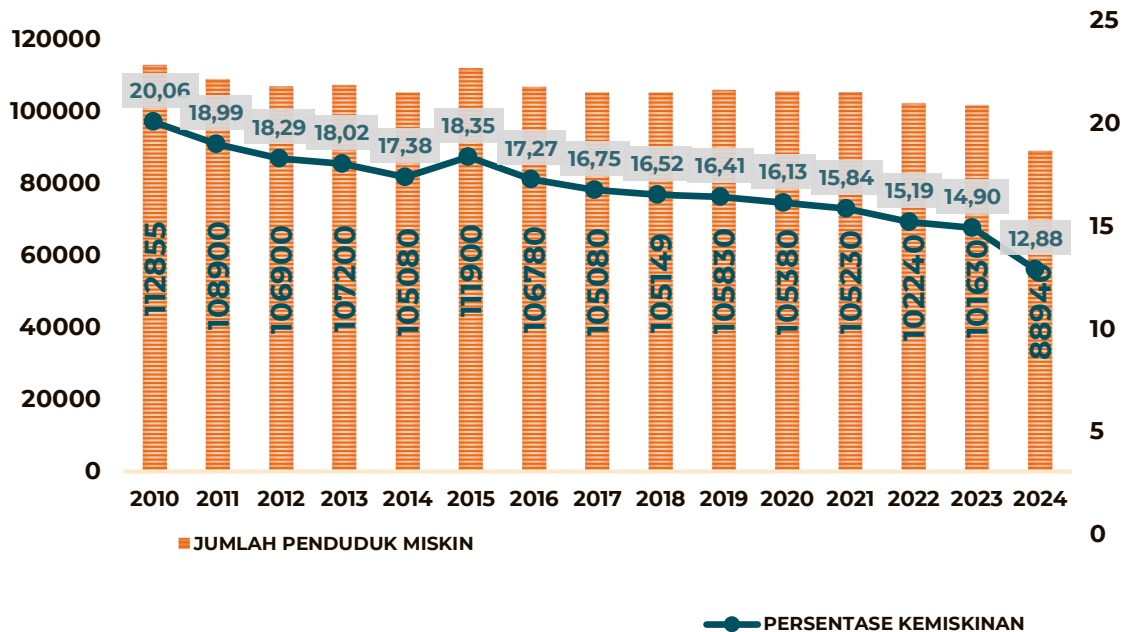
1. Angka Kemiskinan

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dan Indonesia secara keseluruhan yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan nasional. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan masalah serius yang menjadi fokus perhatian dan prioritas utama pembangunan daerah.

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin. tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2010 sampai 2024 menunjukkan tren penurunan kecuali di tahun 2015, dan masih di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada grafik berikut.

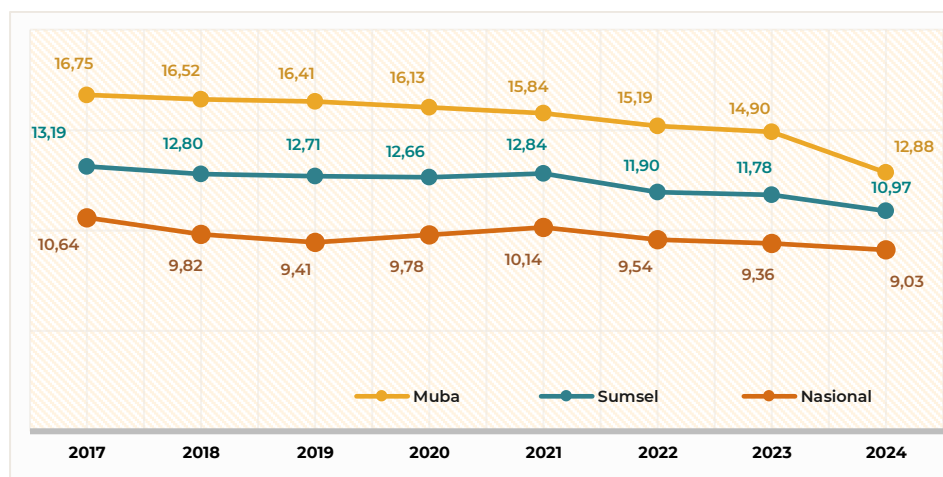


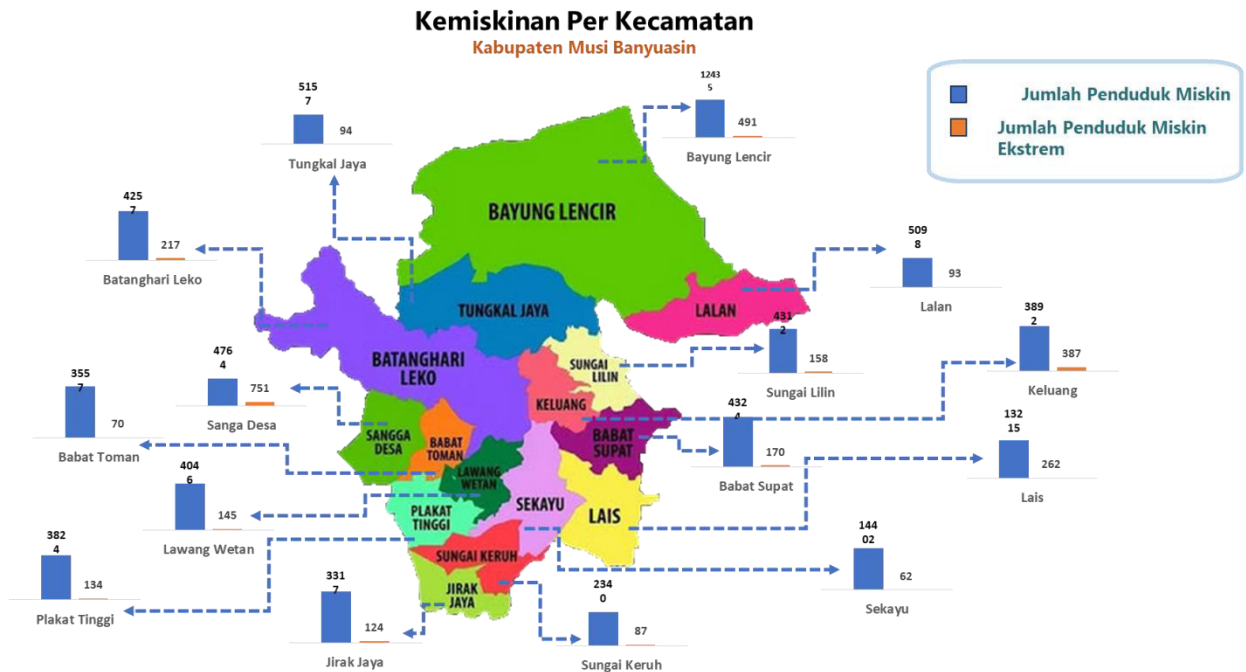
Gambar 3.1
Tren penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: BPS diolah

Dari grafik diatas dapat dilihat penurunan persentase kemiskinan dari tahun 2010 sebesar 20,06% menjadi 12,88% pada tahun 2024 dengan penurunan sebesar 7,18% dengan rata-rata penurunan 0,51%, Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023-2024 sebesar 2,02% Penurunan ini merupakan yang terbesar diantara Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Dengan penurunan persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem pada tahun 2024, setelah lebih dari 20 tahun Kabupaten Musi Banyuasin telah keluar dari predikat tiga Kabupaten dengan penduduk miskin tertinggi di provinsi Sumatera Selatan dan semakin dekat dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang tertuang pada tujuan pembangunan berkelanjutan.



**Gambar 3.2****Peta Sebaran Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2024**

Angka tersebut cukup gemilang mengingat Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu dari 12 Kabupaten/Kota terpilih se-Indonesia sebagai Piloting Project Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan.

Meskipun Kabupaten Musi Banyuasin dikenal dengan sektor pertanian dan perkebunan yang cukup berkembang, ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah masih terlihat signifikan. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sekitar 12-13% dari total penduduk, dengan beberapa kecamatan yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi, terutama yang berada di daerah pedalaman dan terpencil.

Pada Peta Sebaran Penduduk Miskin di atas menunjukkan bahwa penduduk miskin di kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 berjumlah 88.940 Jiwa sebesar 12,88% dan penduduk miskin ekstrem berjumlah 3.245 Jiwa sebesar 0,47%. Jumlah tersebut menurun dari tahun 2023 yang sebelumnya berjumlah 101.630 Jiwa sebesar 14,90% dan kemiskinan ekstrem berjumlah 4.640 Jiwa.



Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar, serta ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Selain itu, tingginya angka pengangguran di kalangan usia produktif turut memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Muba terus berupaya meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui 3 (tiga) program strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Salah satu indikator sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 yaitu menurunnya angka kemiskinan. Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan diestimasi proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei sehingga didapatkan angka/ tingkat kemiskinan. Capaian tersebut diperoleh dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten musu banyuasin}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4**

Capaian kinerja Angka Kemiskinan tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Daerah

Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	14,35%	12,88%	110,24%

Pada tabel di atas, capaian angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 12,88% dengan capaian kinerja sebesar 110,24%. Dimana capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan adalah 88.940 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 594.355,-

1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	15,19%	14,90%	14,35%	12,88%	110,24%

Angka kemiskinan di kabupaten musu banyuasin mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya (2022-2024) Dimana tahun 2024 merupakan penurunan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 2,02%.

1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPD 2023-2026

Indikator	Tahun 2024			Target 2026
	Target	Realisasi	Capaian	
Angka Kemiskinan	14,35%	12,88%	110,24%	13,35%



Besarnya kinerja dalam penurunan Angka kemiskinan yang telah dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 12,88% telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPD (tahun 2026).

1.4 Perbandingan realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar Provinsi dan Nasional

Indikator	Tahun 2024			Gap Terhadap Nasional
	Kabupaten Muba	Provinsi Sumatera Selatan	Nasional	
Angka Kemiskinan	12,88 %	10,97%	9,03%	-3,85%

Penurunan Angka Kemiskinan di 17 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan pada kisaran diatas 1%. Provinsi Sumatera Selatan sendiri mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,81% pada tahun 2024, dan gap terhadap nasional masih menunjukkan angka -3,85% hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan masih menjadi prioritas bagi Kabupaten Musi Banyuasin karena berdasarkan angka kemiskinan masih dibawah rata-rata realisasi provinsi dan nasional.

1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Garis kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 merupakan garis kemiskinan tertinggi diantara seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Tingginya garis kemiskinan menunjukkan tingginya rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dibanding wilayah lain. Namun, peningkatan garis kemiskinan tahun 2024 jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengindikasikan stabilnya harga bahan pokok di Kabupaten Musi Banyuasin.

Rendahnya tingkat pertambahan garis kemiskinan dan drastisnya penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari masifnya program intervensi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara umum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk, Pemerintah melihat dari dua pendekatan



yaitu : ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun non makanan dan kemampuan penduduknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program intervensi kemiskinan yang dilakukan telah memenuhi kedua sisi tersebut dan menyebabkan drastisnya penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024.

Dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi harga bahan pokok melalui rapat TPID dan program Desa Cantik serta melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang pokok ketika terjadi lonjakan harga. Hal ini bermuara pada stabilnya harga barang pokok di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2023-2024. Kestabilan harga barang pokok ini membuat penduduk kabupaten Musi Banyuasin lebih mudah memenuhi kebutuhan pokoknya dan secara langsung mempengaruhi garis kemiskinan sehingga garis kemiskinan pada tahun 2024 tidak meningkat secara signifikan.

Selain menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, pendekatan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya juga tetap diperhatikan. Kemampuan untuk kebutuhan pokok ditunjang oleh solusi jangka pendek berupa pengurangan beban pengeluaran dan solusi jangka panjang berupa program peningkatan pendapatan. Program pengurangan beban pengeluaran yang secara langsung membantu turunnya tingkat kemiskinan adalah program Bantu Umak, beasiswa pendidikan, sembako lansia dan sembako disabilitas. Program peningkatan pendapatan yang dilakukan adalah berupa bantuan modal usaha baik perorangan (Bantu Ubak) maupun berkelompok (KUBE) dan peningkatan keterampilan usaha. Program meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan yaitu dengan penyediaan infrastruktur dasar berupa air bersih, gas rumah tangga, jamban sehat dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.

Adapun program strategis lainnya dalam program penurunan angka kemiskinan yaitu:

a) Bidang Kesehatan

Pembangunan Kesehatan telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran sektor tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan diantara program Universal Health Coverage (UHC) untuk semua masyarakat, pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan (29 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit), pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdarutan secara langsung (Public Safety Center) siaga 24 jam dengan sistem jemput bola dan program Bantuan dan Pendampingan Anak



Sehat (Bunda As). Program Bunda As dimulai awal Tahun 2023 dengan dana swakelola/mandiri (PNS, masyarakat dan perusahaan) dengan mengintervensi 107 anak stunting dengan anggaran Rp. 4.400.000,- per anak. Intervensi diberikan selama tiga bulan dengan cara pemberian pangan lokal yang diolah secara higienis dan gizi cukup oleh Tim pendamping Keluarga dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Dengan adanya program ini, sangat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan anak-anak akan keluar dari stunting. Selain itu juga setiap tahun dilakukan 8 aksi konvergensi stunting, selain intervensi spesifik juga dilakukan intervensi sensitif dengan harapan penurunan angka prevalensi stunting dan mengurangi angka kemiskinan.

b) Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan telah dilaksanakan pendidikan gratis yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2002 sampai sekarang, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pendidikan kesetaraan (Paket B dan C), pemberian beasiswa dan di Tahun 2024 telah dilakukan seleksi siswa kurang mampu berprestasi untuk mendapatkan beasiswa yang berkerjasama dengan Telkom University Bandung. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

c) Bidang Sosial

Di bidang Sosial dilaksanakan program bedah rumah (Dinas Sosial, Dinas PU Perkim dan Baznas), bantuan modal usaha perorangan dan kelompok, Khitanan massal, bantuan hukum gratis, administrasi kependudukan, bantuan fakir miskin dari Baznas, Bantuan tunai untuk masyarakat miskin (Bantu Umak) dan Bantuan tunai untuk bangkitkan ekonomi keluarga (Bantu Ubak). Bantu Umak dilaksanakan Tahun 2023 dengan skema bantuan disalurkan untuk 9.491 KK dan bantuan yang diberikan Rp. 325.000,- per jiwa selama enam bulan dengan sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

d) Bidang Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan diupayakan mengoptimalkan serapan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan tenaga kerja di balai latihan kerja Sekayu dan PPSDM Migas Cepu Jawa Tengah Program ini menyediakan tenaga kerja yang siap pakai dibidang Migas dan keterampilan lainnya. Selain itu juga ada pelatihan disabilitas dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan harapan mereka mendapat keterampilan serta bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan juga untuk menciptakan lapangan kerja.

e) Bidang Ketahanan Pangan



Dibidang ketahanan pangan telah dilaksanakan program pengadaan cadangan pangan, distribusi pangan pokok, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan penyediaan infrastruktur lumbung pangan. Semua program ini sangat membantu dalam penyediaan pangan untuk masyarakat dan mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

f) Bidang Pertanian, perkebunan dan Perikanan

Di bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan telah dilaksanakan program bantuan sarana dan prasarana pertanian, bantuan bibit ternak, rehabilitasi jalan usaha tani, jaringan irigasi, pendampingan kelompok tani dalam mengelola pertanian yang berkualitas, replanting sawit, pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Dalam menciptakan kelestarian ikan di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan program pengembangan pembudi daya ikan kecil, pengembangan kapasitas nelayan kecil, fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Selain itu juga diberikan ikan segar kepada anak stunting dalam memenuhi kebutuhan protein bagi anak stunting.

g) Bidang Infrastruktur

Untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dilaksanakan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, sarana air bersih, jamban dan tanki septik dan penyediaan tanah untuk relokasi.

h) Pemuktahiran data

- Data P3KE hasil Pemutakhiran dari Kemenko PMK Desil 1-4 sebanyak 76.920 KK yang tersebar di 240 Desa/Kelurahan 15 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah diverifikasi dan validasi oleh Desa melalui Musyawarah Desa diperoleh Desil 1-4 sebanyak 68.207 KK.
- Data hasil Verval telah ditetapkan melalui **Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 279/KPTS-DINSOS/2024** sebagai dasar dalam memberikan intervensi Program Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD.
- Tahun 2024 Data P3KE dimanfaatkan OPD salah satunya oleh Dinas Sosial sebagai data sasaran kegiatan peningkatan pendapatan dengan program bantuan sosial (BANTU UMAK) sebesar **Rp.38.119.600.000,-**

Semua program tersebut diatas akan terus dilanjutkan dengan harapan seluruh masyarakat miskin bisa diintervensi dengan berbagai pendanaan baik dari APBD,



APBN, CSR, Baznas dan Dana Desa. Sangat diperlukan konvergensi antara seluruh *stakeholder* agar angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan.

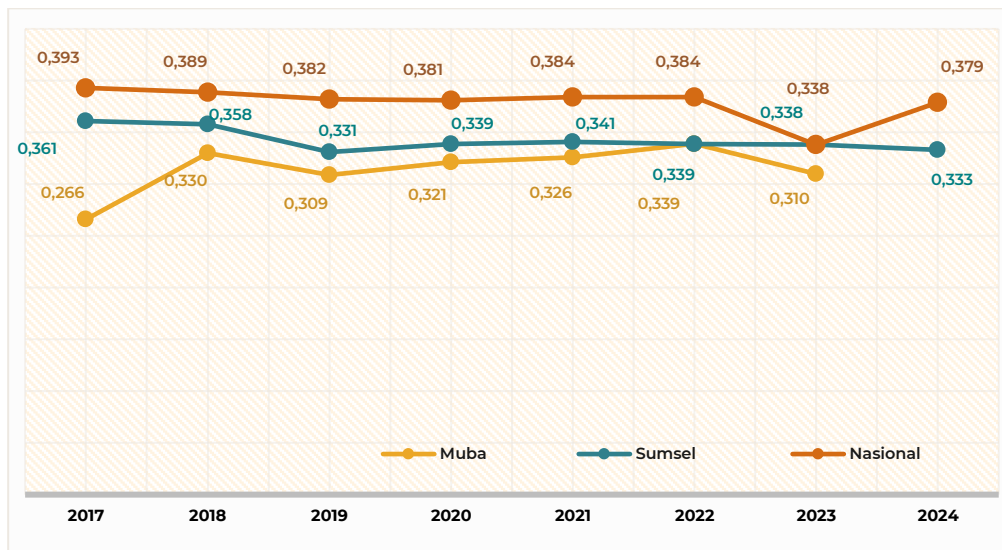
Untuk komponen pendukung tercapainya keberhasilan dalam penurunan angka kemiskinan, terdapat beberapa indikator lain yang mempengaruhi tercapainya penurunan angka kemiskinan sebagai berikut:

1. Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, Tingkat Ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,310 menurun 0,029 dari tahun sebelumnya yaitu 0,339.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin sama dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu 0,338. Ketimpangan ini harus terus dikurangi dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

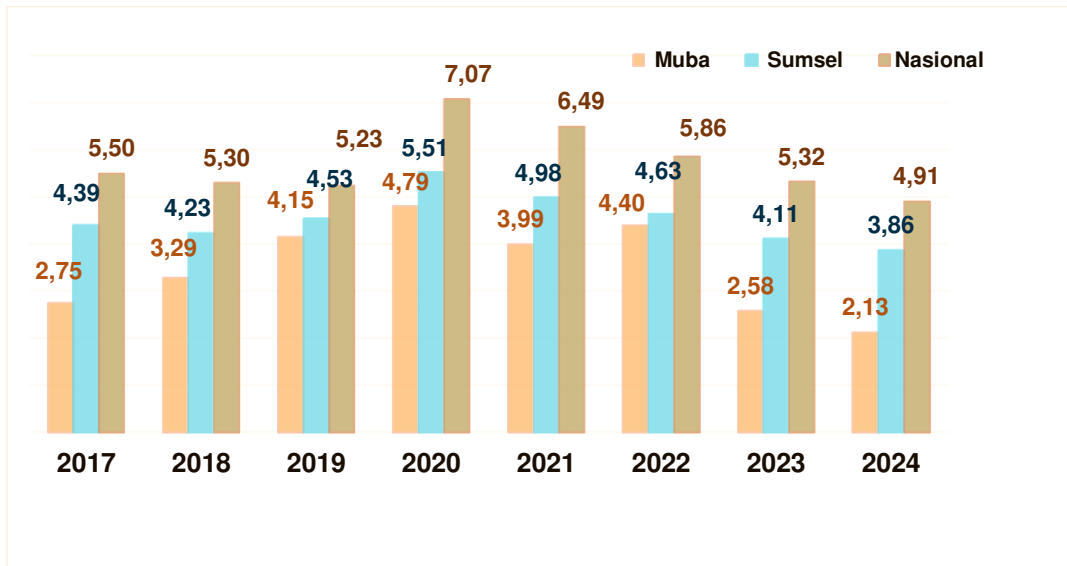
Gambar 3.3
Indeks Gini Muba, Sumsel dan Nasional
Periode 2017 - 2024





2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 3.3.1
Perkembangan TPT Muba, Sumsel dan Nasional
Periode 2017 - 2024

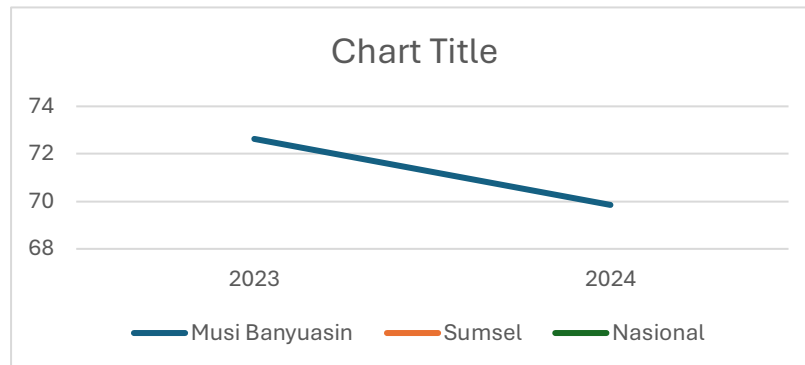


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017-2024 cenderung fluktuatif dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 sebesar 2,13%. Dilihat dari jenis kelamin, Jumlah Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 sebanyak 8.708 orang yang terdiri dari 5.503 (63,2%) laki-laki dan 3.205 perempuan. Pada tahun 2023, TPAK Musi Banyuasin sebesar 72,63 persen yang terbilang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 71,12 persen. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 72,63 persen penduduk Muba yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja.



3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Gambar 3.4
Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023-2024



Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 72,63 dan tahun 2024 sebesar 69,85. Hal ini menunjukkan ada penurunan sebesar -3,83. Terjadinya penurunan tersebut kemungkinan besar terjadi karena kekeringan yang melanda pada akhir tahun 2024 yang membuat perempuan yang dulunya membantu pekerjaan di sektor pertanian menjadi tidak dibutuhkan dan beralih menjadi ibu rumah tangga. Terlihat dari menurunnya jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan menurunnya jumlah penduduk bekerja yang berjenis kelamin perempuan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, dengan Anggaran sebesar Rp.109.612.199.155,-
- Program peningkatan pendapatan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp. 20.009.191.130,-

- Program meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Anggaran sebesar Rp. 106.454.418.161 ,-

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program pengelolaan keuangan daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.314.171.500	4.894.404.750	dalam dan diluar kab.muba	561 orang
2	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38.786.395.200	38.636.609.200	Seluruh Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin	120.300 Jiwa
3	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187.690.438	76.627.876	2 Kecamatan	14479 Orang
4	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000	34.353.941	Sekayu	13821 Orang
5	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.475.380.629	227.570.999	Sekayu	13163 Orang
6	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	94.589.309	85.642.499	Kab. Musi Banyuasin	69074 Orang



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
			Kesehatan Masyarakat					
7	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.665.000	63.195.027	Kabupaten Musi Banyuasin dan 29 Puskesmas di Kab Musi Banyuasin	119045 Orang
8	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	54.555.000	43.908.018	29 Puskesmas & Dinkes Provinsi Sumsel	94849 Orang
9	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80.000.000	69.485.814	Sekayu	51832 Orang
10	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.160.000	25.317.000	29 Puskesmas & 29 Posbindu 130380 Orang	Masyarakat
11	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.012.638.629	986.351.000	29 Puskesmas & 29 Posbindu 39022 Orang	Masyarakat
12	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	11.739.000	29 Puskesmas 1368 Orang	Masyarakat
13	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60.000.000	42.772.350	29 Puskesmas, 3 RSUD, 1 Lapas 11800 Orang	Masyarakat
14	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	60.000.000	44.177.487	29 Puskesmas, 3 RSUD, 1 Lapas 18156 Orang	Masyarakat



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
			Kesehatan Masyarakat	Terinfeksi HIV				
15	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.231.420.000	1.144.245.592	29 Puskesmas	Masyarakat
16	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360.301.500	123.753.055	29 Puskesmas, 3 RSUD 13 Dokumen	Masyarakat
17	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130.606.000	114.980.000	Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	10 Ton
18	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	110.998.700	10.558.700	Kec.Sekayu Kel Serasan Jaya	200 Orang
19	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.950.000	82.645.000	Kec.Sekayu Kel Serasan Jaya	250 Orang
20	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	155.062.064	117.523.700	Kec.Sekayu Kel Serasan Jaya	80 Orang
21	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	40.336.000	24.731.872	Kab. Muba	70 Orang



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
22	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yg memerlukan Perlindungan Khusus Daerah Kab/kota	43.836.000	32.170.147	Kab. Muba	100 orang
23	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	368.460.000	195.218.940	15 Kecamatan	80 Orang
24	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.828.240.860	1.486.003.150	Kec. Babat Toman, Kec. Babat Supat, Kec. Batanghari Leko, Kec. Plakat Tinggi, Kec. Sanga Desa, Kec. Sekayu	39 Keluarga (KUBE), asuransi kematian 631 orang, bantu UBAK 2 orang
25	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	150.000.000	Panti El - Nuza kec sekayu, Panti Hari Kurnia Jaya Kec Lawang Wetan, Panti Nurul Huda Kec Babat Toman	3 Panti
26	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Alat Bantu disabilitas dan Sembako disabilitas	230.562.560	159.324.000	Kec.Tungkal Jaya, Kec.Lalan, Kec. Sungai Keruh, Kec.Sanga Desa, Kec.Lais, Kec.Babat Supat, Kec.Batanghari Leko, Kec.Sekayu	234 orang
27	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.859.302.000	3.839.733.132	Kec. Sekayu., Kec. Lais, Kec. Keluang, Kec. Babat Supat, Kec. Babat Toman, Kec. Plakat Tinggi, Kec. Sungai Keruh, Kec. Lawang Wetan, Kec.Sanga Desa dan Kec.	90 Orang / Unit



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
							Batanghari Leko	
28	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	413.512.000	310.938.700	Kec.Sanga Desa, Kec.Batanghari Leko, Kec.Lalan, Kec.Lais, Kec.Lawang Wetan, Kec.Babat Supat, Kec.Sekayu	200 Orang
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	400.343.400	361.641.500	Sekayu	15 orang
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	263.483.000	258.010.424	15 Kecamatan	10000 Keluarga
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	48.539.250.000	20.696.212.848	15 Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin	17493 Keluarga
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Setda Bagian Hukum Setda Kab. Muba	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Bantuan Hukum	250.000.000	250.000.000	Seluruh Kecamatan	Masyarakat Miskin dalam Kab. Muba yang terkena kasus hukum (50 kasus = 30 Kasus Perdata dan 20 Kasus Pidana)
33	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.320.075	70.000.975	Kec. Lawang Wetan, Lais, Sungai Lilin, Keluang, Sanga Desa, Plakat Tinggi, Sungai Keruh.	Kader Kelompok UPPKA (105 Orang)
34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	41.657.889	37.500.000	Kab. Musi Banyuasin	300 Orang



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
35	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	109.647.402	87.384.869	Kab. Musi Banyuasin	1 Laporan
36	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	527.664.000	475.639.064	Kab. Musi Banyuasin	5 Laporan
Jumlah Mengurangi Beban Pengeluaran					Rp. 109.612.199.155	Rp. 75.270.370.629		
37	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.190.040.000	2.333.237.084	Kec. Sekayu dan PPSDM Cepu Blora Jawa Tengah	100 orang
38	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	214.363.960	1.875.000	Kec. Sekayu	50 Orang
39	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengelolaan perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.055.308.000	1.600.939.845	4 Kecamatan	24 Kelompok
40	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengelolaan perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.555.946.784	942.780.000	4 Kecamatan	4 Koperasi
41	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	1.914.624.850	1.315.693.550	10 Kecamatan	18 kelompok (180 Orang)
42	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan	208.652.000	116.288.841	Kec. Sekayu, Kec. Sanga Desa, Kec. Sungai Keruh, Kec. Sungai	8 Kelompok



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
				, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Lilin, Kec. Tungkal Jaya	
43	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.628.463.900	3.264.878.902	Kec. Babat Supat, Kec. Sanga Desa, , Kec. Keluang, Kec. Tungkal Jaya	8 Kelompok
44	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	345.932.887	301.540.900	KecamatanSun gailin Desa Pinang Banjar dan Kecamatan Tungkal Jaya Desa Berojaya Timur	2 Kelompok (Mesin Cacah Sampah, Mesin Cetak Pakan Ikan Tenggelam dan Mesin Penepung)
45	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	14.550.000	10.135.000	8 kecamatan	30 unit usaha
46	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	680.799.800	627.457.280	15 kecamatan	500 orang
47	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	1.169.738.000	553.793.679	5 Kecamatan	70 pelaku usaha



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
				Kabupaten/Kota				
48	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.709.221.400	1.856.979.900	4 Kecamatan	4 Kelompok Tani
49	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	644.605.000	559.625.000	Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan	5 Kelompok Tani
50	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.168.281.509	1.024.576.153	15 Kecamatan dalam Wilayah Kab.Muba	15 Dokumen
51	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	615.000.000	585.000.000	36 desa	41 Kelompok Wanita Tani
52	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Umkm	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.853.925.000	0	Kecamatan Lais dan Kecamatan Sungai Lilin	40 Usaha Mikro
53	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	499.450.000	499.450.000	sekayu	42 Orang
Jumlah Meningkatkan Pendapatan					Rp. 20.009.191.130	Rp. 11.658.199.205		
54	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	724.340.000	642.083.784	Kec. Sekayu	80.000 anak sekolah



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
			Kabupaten/Kota	aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Transportasi anak sekolah)				
55	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	18.499.569.843	16.183.357.000	13 Kecamatan	3462 Unit
56	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.003.230	0	Kec. Bayung Lencir	10.61 Liter/Detik
57	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	25.134.458.530	22.861.122.732	13 Kecamatan	1790 Rumah Tangga
58	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	14.300.000.000	13.300.000.000	4 Kecamatan	60 Unit Rumah /30 couple
59	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	30.186.386.400	26.973.900.000	12 Kecamatan	590 Unit Rumah



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
				(Sepuluh) Ha				
60	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	343.074.000	230.654.856	15 kecamatan	40 pelaku usaha
61	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	98.557.200	37.235.500	Desa Judli Kecamatan Sanga Desa	1 Unit
62	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.760.302.232	13.831.115.090	Kecamatan dalam desa	41 Unit
63	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	855.548.496	818.732.850	3 Kecamatan	- Poktan Kaya Tani - Poktan Tani Makmur - Poktan Maju Bersama II - Poktan Tirta Rahayu
64	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	189.259.951	188.947.000	Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin	Poktan Banjar Harum II
65	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	822.010.000	760.257.927	Kecamatan Lawang Wetan	- Poktan Harapan Bahagia - Poktan Sejahtera
66	Meminimalkan Wilayah	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga	94.354.000	87.446.000	Sekayu	Masyarakat



No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
	Kantong Kemiskinan		Bidang Kesehatan	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
67	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	346.554.279	183.968.666	Seluruh Desa dalam Wilayah Kab.Muba	4 Dokumen

Berdasarkan tabel di atas, program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2024 pada intinya dibagi menjadi tiga, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

- Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, dengan Anggaran sebesar Rp. 109.612.199.155,-
- Program peningkatan pendapatan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp. 20.009.191.130,-.

- Program meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Anggaran sebesar Rp. 106.454.418.161 , -

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muba didominasi oleh sektor-sektor yang berhubungan erat dengan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Beberapa komoditas utama yang menjadi pendorong ekonomi daerah ini adalah padi, jagung, kelapa sawit, karet, perikanan, dan migas. Sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muba, dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Selain itu, sektor industri dan perdagangan UMKM juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kabupaten Muba memiliki potensi untuk pengembangan hilirisasi, khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Pertumbuhan sektor ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Tabel 3.8

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Indikator	Tahun 2024		
	Target pada Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4,00-4,50	4,94	109,77%

**Sumber: BPS diolah*



Berdasarkan informasi pada tabel diatas bahwa realisasi indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 4,91 persen telah berhasil tercapai dari target perjanjian kinerja yaitu sebesar 4,00 -4,50 persen dengan capaian 10,11 persen.

2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,51	4,00-4,50	4,94	109,77

Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 dan tahun 2023 perekonomian secara umum menunjukkan petumbuhan yang stabil pada angka 4,27 persen, mendasarkan data series pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Banyuasin, maka pada tahun 2024 ekonomi kabupaten Musi Banyuasin tumbuh sebesar 4,91 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan terhadap perekonomian pada tahun sebelumnya.

2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.10
Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD 2026

Indikator	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026	Progres Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pertumbuhan Ekonomi	4,00-4,50	4,94	109,77	4,35-5,00	98,8%



Berdasarkan informasi pada tabel diatas bahwa pada tahun 2026 yang menandakan tahun terakhir pelaksanaan RPD, target kinerja indikator pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35 – 5,00. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 4,92 maka progress kinerja yaitu 98,2%.

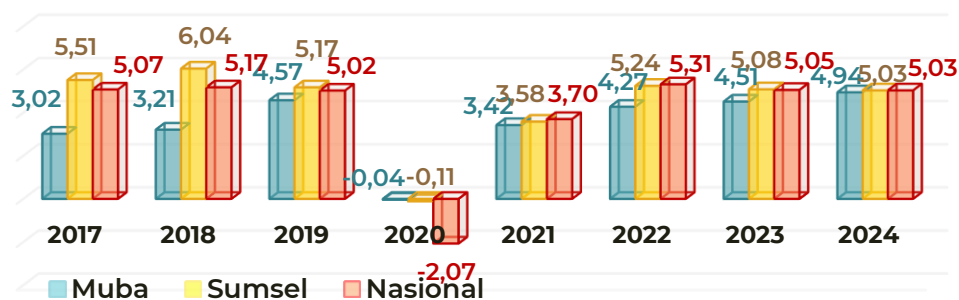
2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

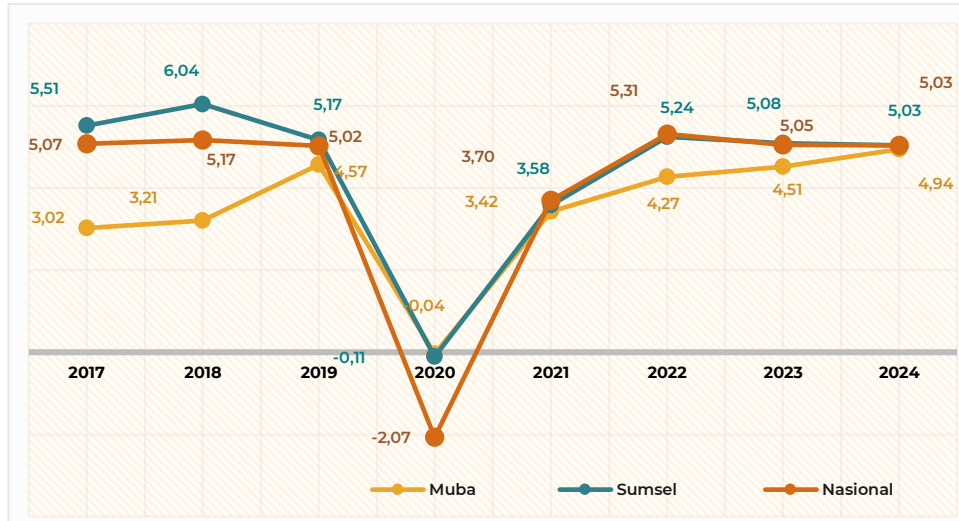
Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator	Tahun 2024			Gap
	Kabupaten Muba	Provinsi	Nasional	
Pertumbuhan Ekonomi	4,94	5,03	5,02	-0,08

Berdasarkan informasi diatas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten musi banyuasin pada tahun 2024 sebesar 4,94 yang berarti masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Gambar 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kab. MUBA, Provinsi SUMSEL



**Gambar 3.5.1****Pertumbuhan Ekonomi Kab. MUBA, Provinsi SUMSEL**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang positif. Pada tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muba tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global dan nasional, seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak dari perubahan iklim. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin mampu mempertahankan dan bahkan mempercepat laju pertumbuhannya, terutama di sektor-sektor strategis yang mendominasi ekonomi daerah.

Namun, meskipun angka pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sektor-sektor tertentu seperti transportasi dan pengelolaan sampah daur ulang masih memiliki potensi yang belum maksimal. Oleh karena itu, upaya diversifikasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat dalam beberapa tahun ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif setelah sempat mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 turun hingga negatif pada tahun 2020 sebesar - 0,04%. Namun pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat sebesar 4,94%.

**2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditentukan**

Menurut Data BPS Tahun 2024, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang didorong oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Keberhasilan ini bukanlah hasil dari satu kebijakan atau program saja, melainkan gabungan dari berbagai upaya yang mencakup sektor ekonomi, infrastruktur, kebijakan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024:

a. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,64	4,30	5,10	6,87	4,58

Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami trend yang cukup baik setiap tahunnya. Trend peningkatan terjadi mulai dari tahun 2020 sebesar 2,64% menjadi 6,87% tahun 2023. Namun, adanya penurunan ditahun 2024 sebesar 4,58%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyesuaian harga komoditi.

b. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	1,27	2,94	10,31	9,61	3,16

Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Trend peningkatan terjadi mulai dari tahun 2020 sebesar 1,27% menjadi 10,31% tahun 2022. Namun, adanya penurunan ditahun 2023 sebesar 9,61% dan tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 3,16%. Penurunan tersebut disebabkan kurangnya prioritas dalam penguatan sektor industri pengolahan dapat menyebabkan ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor industri pengolahan perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------	------	------



Pertambangan dan Penggalian	52,48	53,84	54,94	51,16	49,79
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

*sumber: BPS diolah

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana bagi hasil pada sektor pertambangan/migas berada diatas 50% dari total APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio dengan realisasi sebesar 49,79%. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bagi hasil pada sektor migas.

c. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)

Lapangan Usaha / Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran	-0,37	7,75	9,42	10,57	9,81

Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari tahun 2020 rasio perdagangan besar dan eceran sebesar -0,37% meningkat menjadi 9,81% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-0,29	6,67	12,45	15,55	18,75

Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang sangat baik setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari tahun 2020 rasio penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,29% meningkat menjadi 18,75% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan dampak perekonomian masyarakat yang sudah membaik setelah pandemi *Covid-19*.



2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merencanakan program/ kegiatan/sub kegiatannya dengan berfokus kepada sasaran pencapaian laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

1. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan;
3. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan
4. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pertumbuhan sektor-sektor diatas dicapai melalui upaya-upaya berikut ini:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (untuk Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan).

Sektor ini dipacu pertumbuhannya melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah berikut ini:

- a. Dinas Perkebunan

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 276.173.250,-. Dalam bentuk pendampingan kepada petani kelapa sawit untuk melakukan replanting kelapa sawit seluas 1.069 Ha milik 488 pekebun.
- Melalui Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 2.709.221.400,-. Dalam bentuk pemberian bantuan sarana pendukung perkebunan berupa pupuk NPK, Handsprayer dan Mesin Pemotong Rumput kepada 23 Kelompok Tani.
- Melalui Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.174.295.900,-. Dalam



bentuk pengadaan kecambah kelapa sawit sebanyak 80.000 butir, baby bag kelapa sawit sebanyak 1.400 batang dan benih pinang 45.000 benih untuk 24 kelompok tani.

- Program Pembangunan Prasarana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 98.557.200,-. Dalam bentuk pembangunan embung pertanian sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 1 unit.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 20.383.722.794,-. Dalam bentuk pembangunan, dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani sebanyak 44 ruas jalan.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan dam parit sebanyak 6 unit.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.800.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 16 unit.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 14.685.137.341,-. Dalam bentuk pembukaan lahan tanpa bakar dengan menggunakan alat berat untuk 12 Kelompok Tani serta pengadaan alat berat berupa 4 unit excavator yang akan disewakan kepada petani untuk pembukaan lahan tanpa bakar.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 20.383.722.794,-. Dalam bentuk pembangunan, dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani sebanyak 44 ruas jalan.



- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan dam parit sebanyak 6 unit.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.800.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 16 unit.

b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.087.966.888,- dalam bentuk pemberian bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 21 unit dan Traktor Roda 4 sebanyak 3 unit untuk 24 Kelompok Tani.
- Melalui Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 644.605.000,- dalam bentuk pemberian bantuan benih jagung dan dolomit untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Lalan.
- Melalui Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 317.164.000,- dalam bentuk pemberian bantuan benih padi label ungu, herbisida, insektisida, pupuk NPK untuk penangkaran benih padi unggul kepada 2 kelompok tani di Desa Bailangu Timur.
- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.825.536.013,- dalam bentuk pemberian bantuan alsintan berupa *Combine Harvester* sebanyak 3 unit, *power thresher* sebanyak 20 unit untuk 23 kelompok tani.
- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.334.679.000,- dalam bentuk pemberian bantuan bahan kimia/pupuk, bahan-bahan/bibit tanaman untuk pengembangan bawang merah 5 Ha kepada 1 kelompok tani.



- Melalui Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 3.592.752.000,- dalam bentuk pemberian bantuan ternak kambing, sapi dan ayam petelur kepada 20 kelompok peternak.
- Melalui Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 295.350.000,- dalam bentuk belanja *Straw* (semen beku) sapi sebanyak 5.000 dosis dan belanja nitrogen cair sebanyak 10.000 Liter untuk keperluan inseminasi buatan.
- **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
 - Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 887.028.496,- dalam bentuk pembangunan embung pertanian sebanyak 4 unit.
 - Melalui Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 229.119.951,- dalam bentuk perkerasan jalan usaha tani (JUT) dengan koral sebanyak 1 ruas jalan.
 - Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 822.010.000,- dalam pemberian bantuan pembangunan sumur bor 1 unit untuk 1 kelompok tani dan pembersihan lahan (*land clearing*) 180.000 M2 untuk 1 kelompok tani.
 - Melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 300.000.000,- dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam (sumur bor) sebanyak 1 unit untuk 1 kelompok tani.
- **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
 - Melalui Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 509.648.300,- dalam bentuk belanja obat ternak Ruminansia, obat ternak unggas dan vaksin ternak.



- **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

- Melalui Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 273.199.000,- dalam bentuk pengadaan fungisida 500 L, Pengadaan Molukisida 480 Kg dan Pengadaan Rodentisida 5.000 batang.

- **Program Penyuluhan Pertanian**

- Melalui Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 535.050.750,- dalam bentuk pelaksanaan sekolah lapang untuk 125 petani dan sosialisasi penerapan CSA untuk 75 petani.

c. Dinas Perikanan

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari :

- **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.055.308.000,- Dalam bentuk pemberian bantuan sarana penangkapan ikan berupa perahu, mesin perahu dan jala untuk 18 kelompok nelayan.
- Melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.555.946.784,- dalam bentuk pemberian bantuan sarana penangkapan ikan untuk 4 koperasi perikanan berupa perahu, mesin perahu, jala, jaring, cool box, senter dan baju pelampung.

- **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- Melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.914.624.850,- dalam bentuk pemberian bantuan budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal dan kolam tanah untuk 27 kelompok.
- Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 3.628.,463.900,- dalam bentuk pemberian bantuan budidaya ikan lele



dan nilai untuk 7 Kelompok serta pembangunan 1 Unit Pembenihan Rakyat.

- Melalui sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 345.932.887,- dalam bentuk pemberian bantuan mesin pembuatan pakan ikan mandiri sebanyak 8 unit untuk 2 kelompok budidaya ikan.
- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya Yang Dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 592.034.500,- dalam bentuk pengadaan benih ikan lokal yang akan dilepasliarkan di 6 (enam) lokasi perairan umum daratan dan pemberian bantuan alat tangkap ikan berupa perahu dan mesin perahu untuk 3 Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.

2. Peningkatan produktivitas sektor usaha mikro, IKM dan Industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (untuk Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan, Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Sektor-sektor ini dipacu pertumbuhannya melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah berikut ini:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Musi Banyuasin

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- **Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Dalam bentuk pelatihan untuk 120 orang Pengurus Koperasi dengan materi manajemen pengelolaan koperasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 324.754.400,-.

- **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.**

Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha serta peningkatan kemitraan usaha koperasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 399.939.300,-.



Dalam bentuk pelatihan kepada 60 koperasi dengan materi peningkatan kemitraan usaha koperasi.

- **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 168.306.600,-.

Dalam bentuk pendampingan pengurusan perizinan terhadap 2500 pelaku usaha mikro.

- **Program Pengembangan UMKM.**

Melalui Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 6.307.797.180,-.

Dalam bentuk:

- 1) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro kepada 60 pelaku usaha,
- 2) Pelatihan Wirausaha Pemula kepada 80 pelaku usaha,
- 3) Bantuan Modal Kerja berupa Hibah Uang kepada 410 pelaku usaha, dan
- 4) Mengikuti Pameran Promosi Produk Usaha Mikro pada HUT UMKM, Sumsel Expo dan Smesco.

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- **Program Sarana Distribusi Perdagangan**

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 17.070.863.200,-.

Dalam bentuk rehab berat dan rehab ringan pasar, penataan halaman pasar dan pembangunan los pasar di dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 9 unit.

- **Program Pengembangan Ekspor**

Melalui Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.008.760.100,- dan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.714.363.100,-.



Keduanya dalam bentuk memfasilitasi pelaku usaha untuk ikut dalam pameran dagang dengan total sebanyak 64 pelaku usaha.

- **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Melalui Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 217.015.000,-.

Dalam bentuk pemasaran melalui kemitraan dengan hotel. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sebanyak 4 pelaku usaha.

- **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 136.385.314,- dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp469.557.886,-.

Dalam bentuk:

- 1) Bimtek Anyaman Purun untuk 20 pelaku usaha.
- 2) Fasilitasi Perizinan (HAKI dan Halal) untuk 33 pelaku usaha.
- 3) Bimtek Juleha (Juru Sembelih Halal) untuk 10 pelaku usaha.
- 4) Belanja Peralatan IKM Karet untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).
- 5) Belanja Peralatan IKM Permen Herbal Gambir untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).
- 6) Belanja Peralatan IKM Teh Herbal Gambir untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).

- **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Melalui Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 43.414.000,-.

Dalam bentuk penyusunan dokumen data IKM Tahunan yang mencatat perkembangan pertumbuhan IKM.

C. Dinas Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah:



- **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 14.550.000,-. Dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi penerbitan NIB dan P-IRT untuk 5 unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- Melalui Sub Kegiatan Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.169.738.000,-. Dalam bentuk pemberian bantuan usaha pengolahan hasil perikanan berupa chest freezer, drum, kompor gas, kualiti, para-para, timbangan, vacuum sealer untuk 4 Poklamsar serta bedah Unit Pengolahan Ikan untuk 3 kelompok.

3. Peningkatan iklim investasi dan pelayanan perizinan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Upaya ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui program-program berikut ini:

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 45.835.750,- dan Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan Rp 215.158.000,-.

Dalam bentuk:

- 1) Penyusunan dokumen Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Penyusunan Dokumen Infografis Potensi dan Peluang Investasi.

- **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 180.872.555,- dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 91.865.500,-.

Dalam bentuk:



- 1) Penyediaan pelayanan perizinan sebanyak 1500 pelaku usaha.
- 2) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi sebanyak 10 pelaku usaha.

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 359.078.500,-.

Dalam bentuk pemberian bimbingan teknis kepada 566 pelaku usaha.

3. Indeks Pelayanan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur dasar yang memadai akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendukung konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Infrastruktur (IPI) adalah agregat dari pelayanan dasar infrastruktur digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar di suatu daerah. Dalam penilaian pelayanan infrastruktur ini yang ditetapkan targetnya adalah pelayanan jalan dalam kondisi mantap, air minum dan sanitasi. Berbagai upaya telah dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil, meskipun tantangan besar masih dihadapi, terutama luasnya wilayah dan kondisi geografi yang menyebabkab pemerataan infrastruktur belum merata di seluruh wilayah.

Untuk mengukur Target dan Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur setiap tahunnya sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam dokumen RPD Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 maka dilakukan perhitungan pada masing masing pelayanan infrastruktur yang sudah ditetapkan. Layanan infrastruktur tersebut meliputi: 1. Infrastruktur Jalan; 2. Infrastruktur Air Minum; 3. Infrastruktur Sanitasi (Air Limbah).

Formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Infrastruktur sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{realisasi (Infrastruktur Jalan + Infrastruktur Air Minum + Infrastruktur Sanitasi (Air Limbah))}}{3} \times 100\%$$

**3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah****Tabel 3.12****Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah**

Indikator	Tahun 2024		
	Target pada Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Infrastruktur	91,15	80,55	88,37

Berdasarkan capaian indikator pelayanan infrastruktur sesuai tabel di atas, capaian indeks pelayanan infrastruktur berada pada angka 88,37 persen dimana belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 91,15 persen dengan realisasi sebesar 80,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan infrastruktur masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap infrastruktur di kabupaten musu banyuasin.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**Tabel 3.13****Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya**

Indikator	Realisasi (Tahun)		Indikator	Tahun 2024		
	2022	2023		Target	Realisasi	Capaian
Kondisi Jalan Mantap	53,27	59,37	Pelayanan Infrastruktur	91,15	80,55	88,37



Indikator Indeks pelayanan infrastruktur dimasukkan ke dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026 yang diharapkan akan lebih komprehensif dalam penilaian pelayanan infrastruktur di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara global pelayanan infrastruktur dasar di daerah yang meliputi pelayanan air minum, pelayanan sanitasi dan Kondisi jalan mantap. Pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 pelayanan infrastruktur menggunakan indikator persentase jalan dalam kondisi mantap, yang hanya berfokus pada konektivitas saja. Realisasi Indeks pelayanan infrastruktur tahun 2024 di kabupaten musu banyuasin sebesar 80,55 dari target sebesar 91,15 persen atau capaiannya sebesar 88,37 persen.



3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPD 2026

Indikator	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026	Progres Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pelayanan Infrastruktur	91,15	80,55	88,37	93,37	86,26%

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi indeks Pelayanan Infrastruktur tahun 2024 dengan target akhir RPD pada tahun 2026. Indeks Pelayanan Infrastruktur pada tahun terakhir RPD adalah 93,37, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 80,55. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024, maka memiliki progres kinerja sebesar 86,63%.

3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.15
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator	Tahun 2024			Gap
	Kabupaten Muba	Provinsi	Nasional	
Indeks Pelayanan Infrastruktur	80,55	N/A	N/A	N/A

Indeks Pelayanan Infrastruktur merupakan persentase gabungan dari tiga pelayanan infrastruktur dasar yaitu kondisi jalan mantap, akses air minum dan sanitasi layak yang benchmark kinerjanya mempedomani juga pada level provinsi dan level nasional.

**3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indeks Pelayanan Infrastruktur yang meningkat ditunjang dari seluruh indikator mikro yang juga meningkat, yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih, Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (Air Limbah) yang layak, Persentase Kawasan Kumuh Tertangani, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

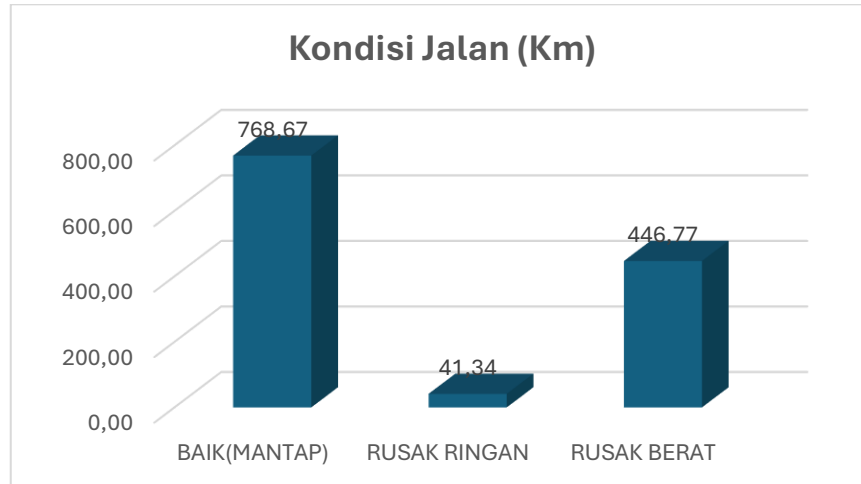
a) Persentase Jalan yang kabupaten dalam kondisi mantap

Tabel 3.16**Realisasi Persentase Jalan Yang Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

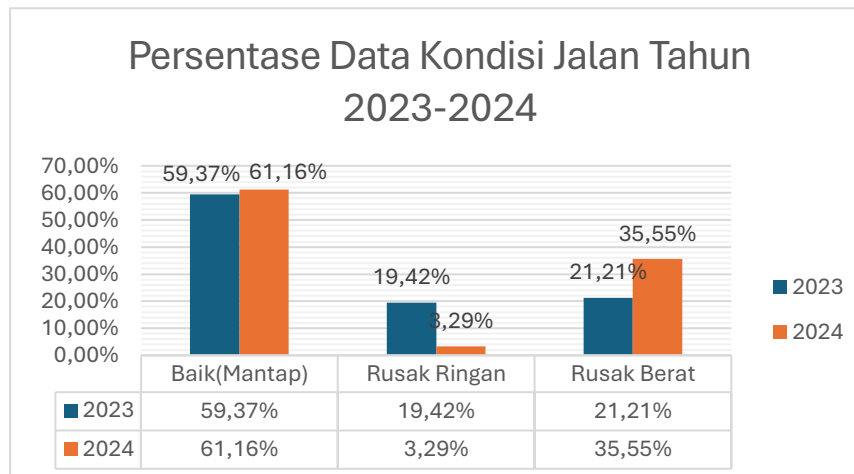
Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jalan yang kabupaten dalam kondisi mantap	59,37	73,14	61,16	83,62

Realisasi Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 terjadi kenaikan dibanding Tahun 2023. Dimana Tahun 2024 realisasi sebesar 61,16% (768,67 Km) dari target sebesar 73,14% (919,21Km). Pencapaian pada tahun 2023 sendiri sebesar 59,37% (746,09 Km) dari target sebesar 68,62% (862,40 Km), maka dapat dilihat terjadinya peningkatan.

Meski terdampak oleh adanya efisiensi, capaian kinerja program penyelenggaraan jalan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala, dengan upaya peningkatan kinerja yang terus-menerus, diharapkan program penyelenggaraan jalan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 3.6****Grafik Data Kinerja Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024**

	BAIK (MANTAP)	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
Km	768,67	41,34	446,77
%	61,16%	3,29%	35,55%

Gambar 3.7**Grafik Perbandingan Kondisi Jalan Tahun 2023 – 2024**



- b) Persentase Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih

Tabel 3.15

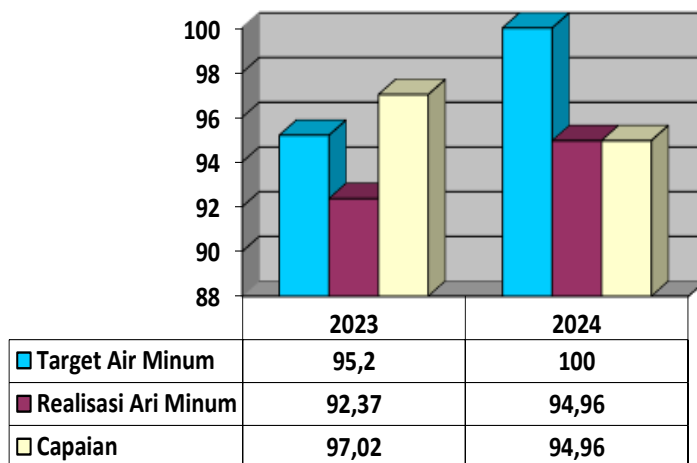
Realisasi Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih Tahun 2024 dan Beberapa Tahun terakhir

Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih	92,37	100	94,96	94,96

Realisasi jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan secara akumulatif dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mencapai 94,96% dari jumlah penduduk yaitu sejumlah 224.709 KK yang terlayani air bersih. Adapun demikian terjadi fluktuasi Capaian Kinerja disebabkan beberapa faktor, antara lain Perubahan RPD, Alokasi Anggaran dan Kenaikan jumlah Penduduk/ KK dengan rata-rata Capaian Kinerja mencapai 94,96% akan tetapi belum mencapai target akhir RPD 2023-2026 dengan target 100% KK yang terlayani air bersih.

Gambar 3.8

Persentase Penduduk Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih 2023 -2024





Dari grafik di atas menunjukkan peningkatan kinerja dan dilakukan penyesuaian target seiring dengan perbaikan Infrastruktur yang memberikan dampak terhadap target kinerja bagi Perangkat Daerah dan manfaatnya untuk masyarakat.

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini kenaikan Rumah Tangga yang terlayani air bersih setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 92,37% dan pada tahun 2024 sebesar 94,96%. Angka ini naik sebesar 2,59% dibandingkan tahun 2023 dimana realisasi jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih sebesar 94,96%.

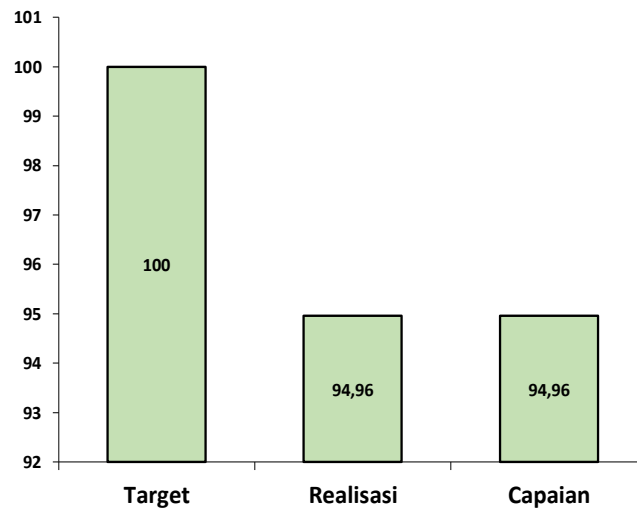
Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 100%, maka jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Strategis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih	%	2023	95,2	92,37	97,02
		2024	100	94,96	94,96



Gambar 3.8
**Persentase Penduduk Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani
Air Bersih**



Pengukuran pencapaian sasaran Infrastruktur yang berkualitas mengalami peningkatan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Laporan Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih pada tahun 2024 terealisasi sebesar 94,96% di tahun 2024.

Capaian realisasi indikator sampai tahun 2024 sebesar 94,96% sudah sangat baik akan tetapi belum mencapai sesuai target kondisi Kinerja Akhir RPD sebesar 100%, dengan capaian ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus mempertahankan capaian yang sudah baik ini.





Semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah. Masalah pokok kawasan perumahan dan permukiman adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana.

Adanya keterbatasan proporsi penduduk yang menerima manfaat dari fasilitas pelayanan air bersih dan air limbah, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Sementara perkembangan perumahan dan permukiman semakin bertambah cepat. Disamping itu kenyataan yang ada bahwa perkembangan infrastruktur menurun karena kemampuan keuangan pemerintah dalam pembiayaan fasilitas perkotaan dan fasilitas pelayanan umum. Berbagai upaya peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan telah dilakukan dalam masalah ini. Salah satu pemecahannya yang tidak memadai, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas, terutama pada penyediaan pelayanan fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lingkungan perumahan dan permukiman yang ada.

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih ini didukung oleh peningkatan dan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah setiap tahun melakukan penambahan sarana prasarana distribusi air bersih di wilayah kecamatan serta terus meningkatkan kualitas air bersih yang dipasok kepada masyarakat. Disamping pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan melalui PDAM Tirta Randik Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga membangun sumur-sumur bor terutama untuk wilayah perdesaan yang sulit dan sangat jauh dari jangkauan layanan air bersih PDAM serta melakukan pembangunan sarana prasarana Air Bersih baik melalui Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum APBD maupun Program HID (Hibah Insentif Desa). Upaya ini dilakukan tidak lain



untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara merata hingga ke wilayah perdesaan.

c) Persentase jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi (Air Limbah) yang layak

Tabel 3.16

Realisasi Persentase jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi (Air Limbah) yang layak Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

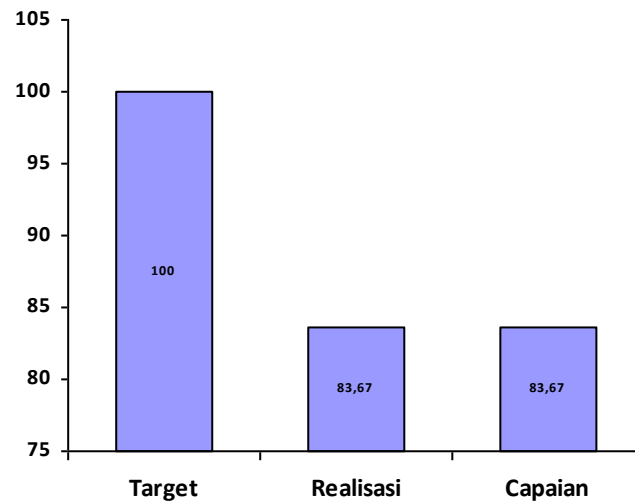
Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi (Air Limbah) yang layak	82,45	100	83,67	83,67

Pengukuran pencapaian sasaran Infrastruktur yang berkualitas meningkat berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Laporan Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Realisasi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak tahun 2024 sebesar 83,67%, atau sebanyak 188.003KK yang telah mendapatkan layanan sanitasi yang layak dari 224.709 KK yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Capaian realisasi indikator sampai tahun 2024 sebesar 83,67% belum tercapai sesuai target kondisi kinerja Awal RPD sebesar 100%, hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah penduduk/Rumah Tangga dan ketidak sesuaian proporsi peningkatan jumlah alokasi anggaran dengan penyebaran dan peningkatan penduduk, walaupun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan upaya dan strategi yang akan diuraian dibawah ini.



Gambar 3.9
Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak



Akan tetapi realisasi pada indikator kinerja utama Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak mengalami peningkatan di setiap tahun melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Keterbatasan anggaran untuk bidang sanitasi tidak sebanding dengan kenaikan target dan jumlah penduduk. Walaupun dengan keterbatasan anggaran dan Efisiensi Belanja pada Pemerintah Daerah, kinerja Bupati Musi Banyuasin di Bidang Sanitasi (Air Limbah) yang Layak mengalami peningkatan. Adapun subkegiatan yang mendukung capaian realisasi dan capaian kinerja sanitasi yang layak adalah :

- 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 2 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.



d) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani

Tabel 3.17

**Realisasi Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2024 dan
Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	7,28	58,17	7,87	13,52

Cakupan kawasan kumuh yang tertangani di tahun 2024 Target RPD 58,17% sedangkan realisasi 7,28% ini disebabkan oleh kegiatan yang lokasi fokus untuk kegiatan yang dilaksanakan di APBD maupun di APBDP 2024 belum mencapai seluruh Kawasan kumuh yang di Peraturan Bupati Kawasan Kumuh 2022 dan juga Keterbatasan anggaran untuk bidang permukiman tidak sebanding dengan Luasan cakupan Kawasan kumuh. Pengukuran capaian indikator sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Adapun program-program yang mendukung capaian realisasi dan capaian kinerja Kawasan Kumuh yang tertangani adalah :



1. Perbaikan bangunan sesuai standar teknis
2. Peningkatan Jalan Lingkungan
3. Perbaikan Drainase
4. Penyediaan Sarana Air Limbah Permukiman
5. Penyediaan Sarana Persampahan

Kegiatan kawasan kumuh di kegiatan 2024

1. Perbaikan bangunan sesuai standar teknis
 - Bedah Rumah Serasan jaya :3 Unit
 - Bedah Rumah Kayuara I:5 Unit
 - Bedah Rumah Bailangu timur:2 Unit
 - Bedah Rumah Saud:6 Unit
 - Bedah Rumah talang leban:10 Unit
 - Bedah Rumah bayung lincir indah:5 Unit
 - Bedah Rumah kel.babat: 1 Unit
 - Bedah Ruman Mangunjaya:1 Uni
 - Bedah Rumah Balaiagung : 1 Unit
2. Peningkatan Jalan Lingkungan
 - Lanjutan Peningkatan jalan dengan cor beton kel.Mangun Jaya
Kec. Babat Toman : 462,4 x 4
 - Rehab Jalan Lingkungan dengan Cor Beton RT.003 RW.002
Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu : 93 x 4
 - Pembuatan Jalan Cor Beton RT 12 Kel. Kayuara kec.sekayu : 51
x 1,5, 92 x 2, 191 x 2

Kegiatan-kegiatan di 2024 dalam Peningkatan Kualitas Kumuh:



e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.18

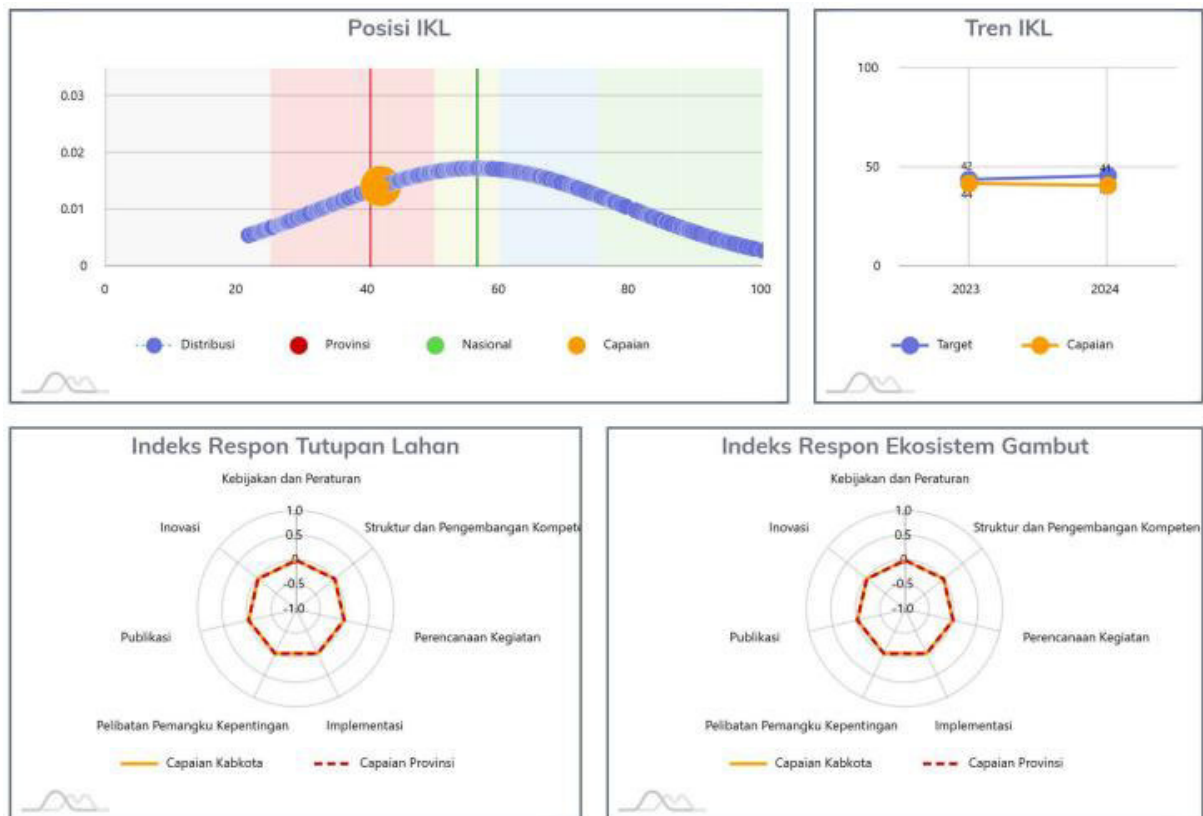
**Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Beberapa
Tahun Terakhir**

Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,05	67,51	68,17	100,97%



Berdasarkan table di atas, terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,12 poin. Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor pendukung lainnya, yaitu Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Ruang Terbuka Hijau, dan Persentase Pengelolaan Sampah.

➤ Indeks Kualitas Lahan (IKL)



Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dilakukan dengan menghitung luas hutan dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Musi Pada tahun 2024 target yaitu **46,30**, Nilai pencapaian indeks telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam kategori **KURANG** dengan pencapaian Indeks yaitu **41,80**.

Nilai IKL menurun pada Tahun 2024 karena pada saat pelaporan titik yang dilaporkan telah terhitung pada tutupan hutan belukar sehingga tidak diverifikasi oleh KLHK.

Rekomendasi untuk memenuhi pencapaian tersebut adalah :



- Melakukan sosialisasi KARHUTLA ke Masyarakat bersama OPD terkait sebagai upaya pencegahan dan monitoring Gerakan Gas Rumah Kaca.
- Penyelenggaraan kegiatan kampung proklam pada desa terpilih yang diselenggarakan oleh DLH Muba.

☛ Indeks Kualitas Air (IKA)



Parameter Kualitas Air (Sungai) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukkan Air dan Baku Mutu Air di Provinsi Sumatera Selatan, yakni:

Fisika: 6 (Temperatur, Bau, Kekeruhan, Warna, TDS, TSS).

Kimia: 28 (pH, BOD, COD, DO, Phospat, Nitrat dst).

Mikrobiologi : 4 (Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Koli Total dst)

Parameter yang diukur untuk Indeks Kualitas Air (Ika) adalah TSS, DO,BOD, COD, Fosfat, Bakteri Coli, Total Coliform Pengambilan sampel dilakukan terhadap: 5 (lima) sungai (Sungai Keruh, Sungai BatanghariLeko, Sungai Dawas, Sungai Tungkal dan Sungai Lalan). Pengambilan sampel dilakukan setiap bulan dalam 1 tahun (15 kali), Perhitungan IKA untuk 1 tahun dihitung dari seluruh sampel parameter kualitas



air, pada tahun 2024 target pencapaian dibuat **56,20**. Realisasi pencapaian sesuai dengan perhitungan dari hasil pemantauan 5 (lima) sungai besar yang ada di 8 (delapan) Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, kondisi ini disebabkan ke 5 (lima) sungai tersebut terindikasi **tercemar ringan**, sedangkan pada tahun 2024 sebesar **58,42**.

a. Faktor Pendorong

- Adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat, instansi terkait dan pelaku usaha serta pemberian izin secara ketat bagi pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.
- Selalu dilakukan evaluasi baik dalam pengevaluasian data perusahaan yang memenuhi syarat administrasi AMDAL, pengevaluasian data kasus yang masuk dan tertangani.

b. Faktor Penghambat

- Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain pemulihan pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, fluktuasi debit air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, pertanian dan domestik.
- Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperandalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Musim panas/kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan beberapa titik pemantauan memiliki debit kecil.
- Terkendalanya akses Transportasi menuju titik lokasi sampling.

c. Tindak Lanjut

- Meningkatkan Pelayanan IPAL DOMESTIK.
- Meningkatkan pembinaan Usaha Skala Kecil



☛ Indeks Kualitas Udara



Indeks Kualitas Udara didapat dari hasil pengambilan data metode absorpsi. Metode absorpsi dilakukan 2 kali dalam setahun selama 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Menggunakan metode Standar Nasional Indonesia dan dilakukan pemantauan, maka pada Tahun tahun 2024 target yang di tetapkan **85,59** realisasi **91,49** Persentase pencapaian target **106,89%**. 2023 target yang ditetapkan **85,49**. Pada Tahun 2022 persentase pencapaian target adalah **85,39**.

a. **Faktor Pendorong**

- Adanya alat pemantau kualitas udara (ISPU), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
- Adanya pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa titik lokasi setiap tahun.
- Pembangunan RTHP di permukiman penduduk dan mempertahankan tanaman perindang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin mampu menjaga kualitas udara perkotaan.

b. **Faktor Penghambat**

- Sumber pencemar antropogenik adalah pencemaran akibat aktivitas manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun



dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.

- Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
- Faktor kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang/berkala pada saat musim kemarau yang menyebabkan peningkatan emisi dan polutan udara yang mempengaruhi nilai polusi yang terjadi.

c. Rekomendasi:

- Agar melakukan proses perencanaan penyiapan kebutuhan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran udara serta peningkatan kerjasama antar stakeholder.
- Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran APBD khusus untuk kegiatan prioritas pengendalian pencemaran udara.
- Melakukan pemantauan kualitas udara dengan penggunaan APBD.
- Pencapaian IKU Tahun 2024 target yang ditetapkan **85,59** realisasi **91,49** Persentase pencapaian target **106,89%** Tahun 2023 adalah 85,49 ; target IKU 2023 adalah 85,49 sehingga capaian IKU tahun 2022 sudah memenuhi target. Agar tetap mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU

☛ Persentase Penanganan Sampah

Tabel 3.19

Realisasi Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	2024	
		Persentase pengurangan sampah (Target)	Persentase penanganan sampah (Realisasi)
1	Persentase Pengelolaan Sampah	100	98,70529

Pada tahun 2022 target pencapaian persentase penanganan sampah adalah **90,83**, Persentase Pencapaian pengelolaan persampahan terhadap target yang



ditetapkan adalah 97,45%, pada tahun 2023 target 36,06% dan realisasi 54,77, dan pada tahun 2024 target persentase pengelolaan sampah adalah 40,20% dan terealisasi 52,23%.



Pengolahan Sampah Organik Untuk pakan Magot (BSF) Di TPS3R



Pemilahan Sampah Plastik guna Proses daur ulang di TPS3R



Pemilahan Sampah Organik Dan Non Organik di TPST Muara Teladan



Packing Sampah Kantong Kresek untuk dijual dan di Daur Ulang di TPST Muara Teladan

(gambar wujud nyata Pengolahan Sampah)

a. Faktor Pendorong

- Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat.
- Terdapat Fasilitas Pendaaurulangan di Kota Sekayu yaitu TPST 3R Prima dan beberapa Bank Sampah. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan Rumah Kompos di TPST 3R prima dengan tujuan sampah dapat dipilah dari Rumah Tangga, mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang benar-benar tidak bisa diolah kemudian dibuang ke TPA Sungai Medak.



b. Faktor Penghambat

- Fasilitas sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pengurangan persampahan sudah tidak layak dan belum optimal.
- Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
- Masih kurangnya tenaga penanganan sampah.

c. Tindak Lanjut

- Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih.
- Berupaya memodernisasi armada pengangkut sampah.
- Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan kualitas kerja.

d. Inovasi

- Melakukan pembinaan kemasyarakatan mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga.
- Melakukan peningkatan kemitraan antara pemerintah kota dan tokoh informal yang memiliki komitmen dalam pengelolaan sampah partisipatif.
- Mendayagunakan informasi manfaat lingkungan dan ekonomi untuk bahan sosialisasi, kampanye lingkungan dan pelatihan/Pendidikan dilingkungan permukiman yang belum melakukan pengelolaan sampah partisipatif melalui sosialisasi pemanfaatan limbah ban bekas sebagai hasil kerajinan industri skala kecil menengah dan pemanfaatan/pengelolaan limbah plastic menjadi bahan bakar minyak serta adanya aplikasi
- RESAMPEL-3R (RETRIBUSI PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH) yang berfungsi sebagai aplikasi pembayaran retribusi persampahan, informasi bagaimana mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis serta survei kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah.
- Menyelenggarakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup



di Sekolah (GPBLHS) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Melalui zoom meeting hal ini diselenggarakan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi agar siswa dan mahasiswa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

☛ Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada tahun 2024 pencapaian persentase pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah 20% dengan capaian realisasi 26,46%. Pada tahun 2023 target pencapaian persentase pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah 20 dan ditahun 2022 dengan nilai yang sama, Nilai pencapaian sesuai hasil ditahun 2021 adalah **25,41**. Nilai ini didapat dari luasan RTH yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM di bagi Luasan RTH Publik yang tersedia di wilayah perkotaan.

Gambar 3.10

Taman Wisata Danau Ulak Lia di Musi Banyuasin



**a. Faktor Pendorong**

- Kewajiban Pemerintah Untuk menyediakan RTH Perkotaan Seluas 30%.
- Menciptakan paru-paru perkotaan untuk menyeimbangkan ekosistem lingkungan.

b. Faktor Penghambat

- Tingginya biaya penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Belum optimalnya penataan dan penanaman vegetasi yang sesuai sekaligus sebagai resapan air dan peneduh serta memperindah kota.
- Belanja dan anggaran biaya yang belum maksimal.

c. Tindak Lanjut

- Mempercepat Regulasi di Bidang Tata Ruang.
- Perlu langkah nyata untuk menyediakan RTH kawasan Perkotaan sebagaimana diatur didalam RDTR

d. Inovasi

- Akan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan organisasi masyarakat yang berorientasi RTH dengan pemerintah dalam bentuk kampanye RTH (Green Campaign) agar masyarakat dan semua pihak lebih memahami arti dan fungsi RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup diwilayah perkotaan.
- Akan mendirikan Yayasan RTH atau membentuk mitra RTH sebagai program partisipasi masyarakat yang berperan aktif untuk mengubah gaya hidup masyarakat menjadi sadar akan lingkungan dan mengarahkan masyarakat berwawasan ekologis.

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Penyelenggaraan Infrastruktur Kabupaten Musi Banyuasin tergantung kepada ketiga indikator kinerja daerah yaitu kondisi jalan mantap, akses air minum dan sanitasi layak. Dari ketiga indikator



tersebut yang tingkat capaiannya masih rendah adalah pada kondisi jalan dalam keadaan mantap.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Pelayanan infrastruktur antara lain :

Adanya perubahan SK jalan kabupaten Tahun 2023 Nomor 92/KPTS-DPUPR/2023, yang menambah panjang jalan kabupaten menjadi 1.258,03 km, yang semula 1.073,77 km yang menyebabkan bertambahnya ruas jalan dalam kondisi belum mantap.

- 1) Pelaksanaan konstruksi jalan yang kualitasnya masih rendah.
- 2) Anggaran untuk pemeliharaan pada tahun 2024 masih belum optimal.
- 3) Masih kurangnya alat berat untuk pemeliharaan jalan.
- 4) Luasnya wilayah menyebabkan pelayanan air minum perpipaan cukup sulit dan memakan biaya yang besar.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Beberapa solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator antara lain:

- a. Mempertahankan jalan dalam kondisi mantap dan meminimalisir terjadinya kerusakan jalan.
- b. Untuk meningkatkan kualitas jalan, padatahun 2024 Dinas PUPR sudah menggunakan standar beton ready mixed concate untuk pengecoran jalan.
- c. Pengadaan alat berat untuk memperluas pelayanan pemeliharaan jalan dalam anggaran tahun 2024
- d. Mengupayakan pendanaan peningkatan jalan dari sumber sumber lain selain APBD, seperti DAK, Bantuan Gubernur dari provinsi, dan dari CSR.
- e. Meningkatkan pelayanan air minum dengan sistem non perpipaan seperti Sumur gali, sumur bor dan program Pamsimas.
- f. Sosialisasi pentingnya PHBS kepada seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan status Kabupaten/Kota sehat.
- g. Tahun 2024 sudah disusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sanitasi



Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- *Indeks Pembangunan Manusia*



Capaian Indikator-indikator Tujuan Pembangunan " Tercapainya Kualitas Sumber Data Manusia Yang Berdaya Saing" Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20**Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin 2 Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	69,71	71,3	103,08

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan di kabupaten Musi Banyuasin, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Provinsi Sumatra Selatan, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tantangan besar masih ada untuk meningkatkan IPM di wilayah ini.

Secara umum, IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan seiring dengan program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator penting dalam perhitungan IPM adalah angka harapan hidup (AHH), yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Kabupaten ini telah berusaha meningkatkan fasilitas kesehatan dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar, membangun puskesmas di beberapa kecamatan, dan meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan di Musi Banyuasin. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan beasiswa, serta pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Program pendidikan vokasi dan kejuruan juga dikembangkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap terjun ke dunia kerja, mengingat sektor ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.



Di sisi lain, aspek ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat juga telah mengalami perbaikan. Perekonomian Musi Banyuasin sebagian besar didorong oleh sektor agraris, terutama perkebunan kelapa sawit, karet, dan perikanan. Pemerintah daerah berusaha untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan sektor industri dan pariwisata. Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan kesejahteraan.

Meskipun ada kemajuan, Kabupaten Musi Banyuasin masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah pedalaman, serta rendahnya tingkat partisipasi dalam sektor ekonomi formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus bekerja keras untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, meskipun IPM Kabupaten Musi Banyuasin masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatra Selatan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan harapan untuk peningkatan yang lebih signifikan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang lebih merata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan kesempatan ekonomi akan menjadi kunci untuk terus meningkatkan IPM di Kabupaten Musi Banyuasin.

4.1. Perbandingan antara target dan kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepada daerah;

Tabel 3.21

Perbandingan target dan kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja

Indikator	Tahun 2024		
	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	69,71	72,27	104,48

Sumber: BPS diolah, 2024

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 72,27 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan telah berhasilnya Kabupaten Musi Banyuasin melebihi target perjanjian kinerja yang ditetapkan sebesar 69,71 sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 104,48%. Pertumbuhan IPM tahun 2024



mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, didukung dengan peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM.

4.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.22

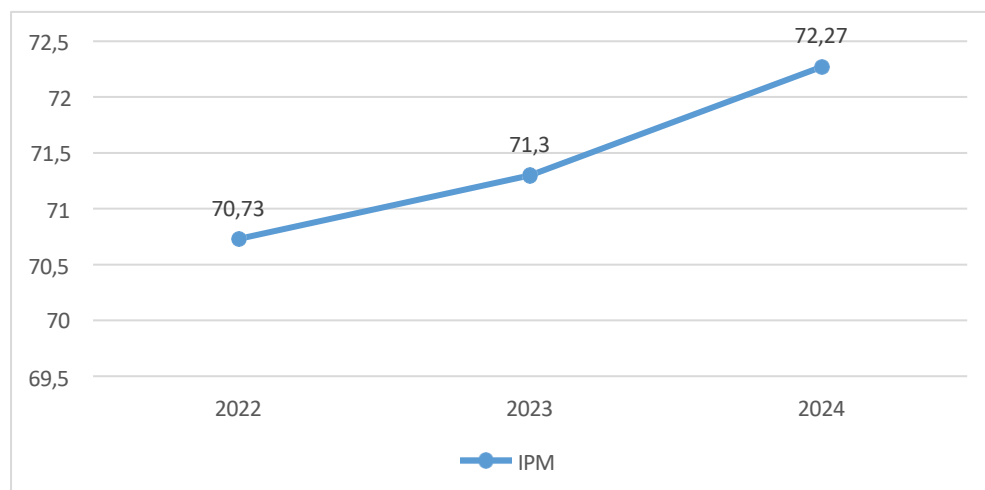
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	68,60	69,71	69,71	72,27	104,48

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, indeks Pembangunan manusia kabupaten musu banyuasin mengalami tren positif. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2022 sebesar 68,60 meningkat 1,11 pada tahun 2023 sebesar 69,71 , dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar 2,56 dengan realisasi menjadi 72,27. Peningkatan tersebut ditandai dengan capaian realisasi sebesar 104,48 di tahun 2024.

Gambar 3.11

IPM Kabupaten Musi Banyuasin 2022-2024





Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Selama 2022–2024, IPM Kabupaten Musi Banyuasin meningkat sebesar 2,18 persen dari 70,73 pada tahun 2022 menjadi 72,27 pada tahun 2024.

4.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.23
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPD 2023-2026

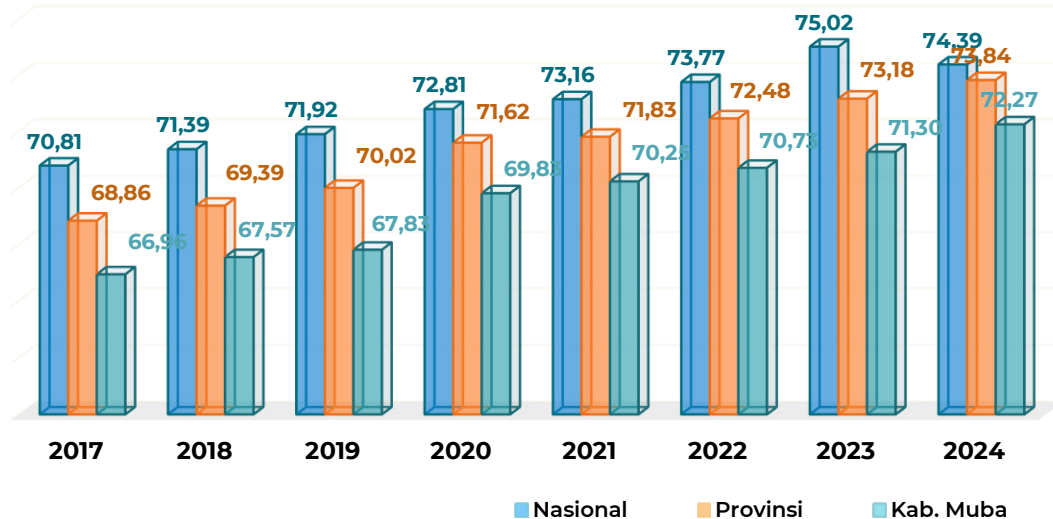
Indikator	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026	Progres Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pembangunan Manusia	69,71	72,27	104,48	70,78	102,10%

Besarnya kinerja dalam indeks Pembangunan manusia yang telah dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 72,27% telah berhasil melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPD (tahun 2026) sebesar 70,78 dengan progress kinerja 102,10%. Hal ini mendorong pemerintah kabupaten musu banyuasin untuk melakukan reuiu terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk indikator indeks Pembangunan manusia.

4.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.24
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional

Indikator	Tahun 2024			Gap
	Kabupaten Muba	Provinsi	Nasional	
Indeks Pembangunan Manusia	72,27	73,84	74,39	-2,12

**Gambar 3.12****Perbandingan Realisasi IPM Muba, Sumsel dan Nasional Periode
2017 - 2024**

Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Musi Banyuasin menempati urutan ke-10 tertinggi dibandingkan dengan 17 kabupaten/ kota dalam Provinsi Sumatera Selatan. Namun, Indeks Pembangunan Manusia masih perlu ditingkatkan lagi karena perkembangan indeks Pembangunan manusia kabupaten musu banyuasin masih dibawah rata-rata realisasi provinsi dan nasional.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Kabupaten Musi Banyuasin berada pada peringkat ke sepuluh dari seluruh kabupaten/kota dengan nilai IPM sebesar 72,27 dengan kategori **IPM “tinggi”**. Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Utara meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,00 dan 70,45. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 14 kabupaten/kota, dan berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 2 kabupaten/kota. Sementara itu, Kota Palembang termasuk dalam status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).



Tabel 3.25
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
Tahun 2022–2024

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota		
	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	72,48	73,18	73,84
Ogan Komering Ulu	72,41	73,17	73,7
Ogan Komering Ilir	70,17	70,80	71,48
Muara Enim	71,52	72,33	73,10
Lahat	71,45	72,15	72,83
Musi Rawas	70,04	70,52	71,21
Musi Banyuasin	70,73	71,3	72,27
Banyuasin	69,95	70,67	71,55
Ogan Komering Ulu Selatan	68,33	69,05	70,00
Ogan Komering Ulu Timur	72,33	73,05	73,64
Ogan Ilir	71,20	72,01	72,67
Empat Lawang	68,39	69,07	69,63
PALI	67,89	68,78	69,63
Musi Rawas Utara	68,76	69,63	70,45
Palembang	81,19	81,72	82,29
Prabumulih	77,14	78,07	78,68
Pagar Alam	72,40	73,25	74,00
Lubuk Linggau	77,71	78,36	78,98

4.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan pada tahun 2024, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) tumbuh sebesar 5,17 persen, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 3,52 persen, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,16 persen.



Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,41 persen (2022-2023) menjadi 0,26 persen (2023-2024). Perkembangan dimensi penyusun IPM selama 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Dimensi Penyusunnya, 2022–2024**

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73,92	74,22	74,42
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,30	12,31	12,33
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,65	7,68	7,95
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	10.453	10.862	11.424
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		70,73	71,30	72,27

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,5 tahun. Pada tahun 2022, UHH Kabupaten Musi Banyuasin adalah 73,92 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,42 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,2 tahun atau 0,26 persen dibandingkan tahun 2023, sehingga anak yang lahir di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga berumur 74 tahun.

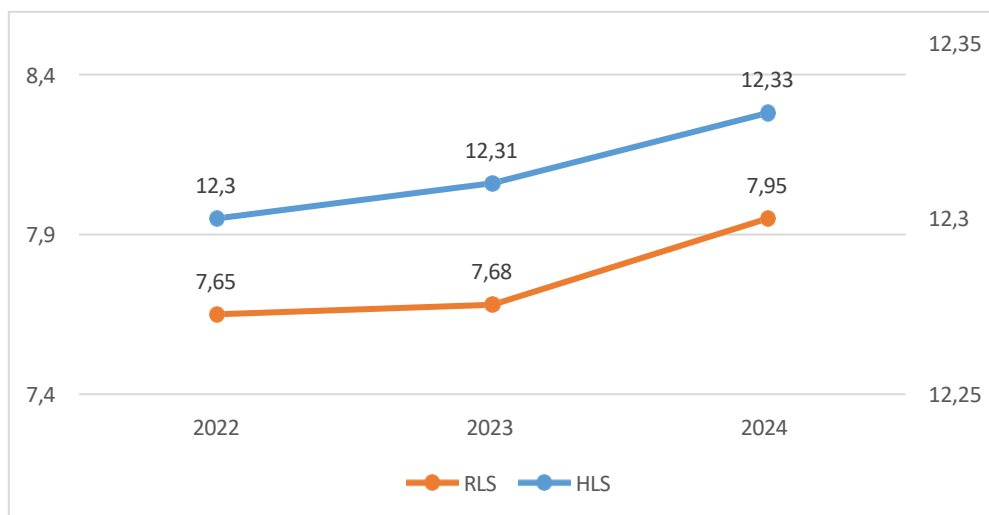


2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. HLS pada tahun 2024 meningkat 0,02 tahun atau 0,16 persen dibandingkan tahun 2023. Sehingga, penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 diharapkan dapat bersekolah hingga 12 tahun atau kelas 3 SMA/ sederajat. Sementara itu, RLS pada tahun 2024 meningkat 0,27 tahun atau sebesar 3,52 persen dibandingkan tahun 2023, yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 rata-rata telah bersekolah selama 7 tahun atau hingga kelas 1 SMP/ sederajat.

Gambar 3.13

UHH Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024



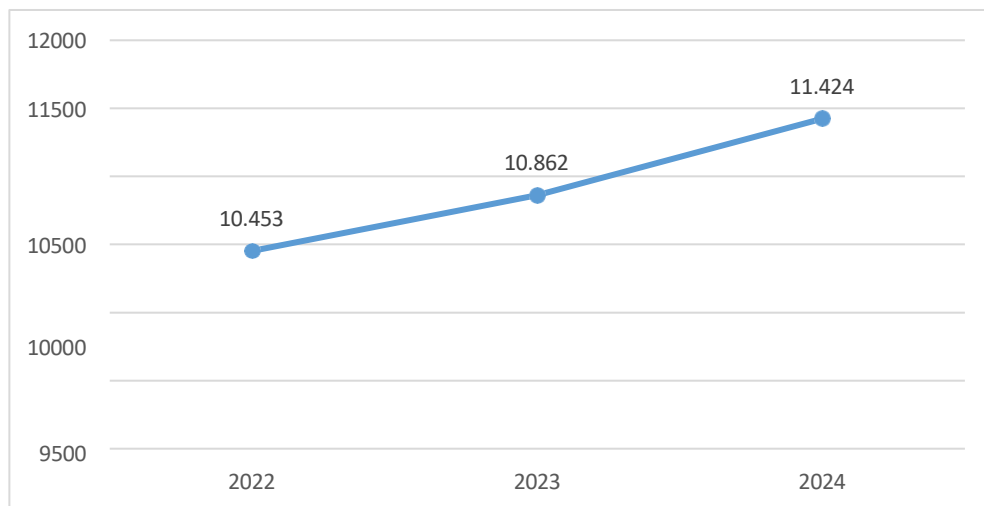


3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 11,42 juta rupiah per tahun. Angka ini meningkat 562 ribu rupiah atau 5,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.14

Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Musi Banyuasin (ribu rupiah), 2022-2024



**4.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 3.27
Program/Kegiatan Pendukung IPM pada masing-masing Dimensi
Tahun 2024

<u>Dimensi Kesehatan</u>		
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	140.192.341.542
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80.830.316.553
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.199.511.189
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	299.100.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863.413.800
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.513.944.100
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	321.468.100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.142.476.000
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	478.677.000



<u>Dimensi Kesehatan</u>		
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	Pemberian Izin Apotik,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35.000.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.387.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	201.290.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	632.705.953
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.173.000
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.299.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	258.233.953
Total		143.817.668.595



<u>Dimensi Pendidikan</u>		
PROGRAM	KEGIATAN	APBD PERUBAHAN 2024 (RP)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	134.033.322.430
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.867.462.888
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.277.240.300
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.526.580.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.314.500
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.568.097.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	372.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	380.380.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.178.016.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.314.171.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.530.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	664.511.873.489
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.450.000



<u>Dimensi Pendidikan</u>		
PROGRAM	KEGIATAN	APBD PERUBAHAN 2024 (RP)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.480.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.411.961.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	803.680.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.104.041.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.183.406.700
TOTAL		977.036.008.607



Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Baik

- *Indeks Reformasi Birokrasi*

**Tabel 3.28****Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten
Musi Banyuasin 3 Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	122,48 %

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan dan pembaharuan dalam sistem birokrasi di suatu lembaga atau instansi pemerintah telah dilaksanakan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang dijalankan.

Reformasi birokrasi itu sendiri merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan menyempurnakan struktur, proses, dan budaya kerja dalam pemerintahan, agar lebih responsif, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi biasanya disusun berdasarkan beberapa komponen utama, seperti:

1) **Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan**

Menilai sejauh mana pimpinan suatu instansi dapat mengarahkan perubahan, mengelola inovasi, dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi yang berjalan.



2) Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Mengukur sejauh mana pengawasan internal dapat berjalan dengan baik dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program.

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan tersebut.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat birokrasi, melalui pelatihan, pendidikan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan karier.

5) Efisiensi dan Efektivitas Organisasi

Menilai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan mengelola proses kerja secara efektif.

Indeks Reformasi Birokrasi menjadi alat evaluasi yang penting bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana implementasi reformasi birokrasi telah dilakukan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, IRB membantu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, modern, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.

5.1 Perbandingan antara target dan kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepada daerah;

Tabel 3.29
Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (60)	B (66,42)*	110,7%*

**realisasi tahun 2023*



Capaian Indeks RB tahun 2023 menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia sebanyak 25,79% mencapai kategori minimal “Baik”, dan 74,21% “Belum Baik”. Ini menggambarkan bahwa kualitas pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota masih belum baik, masih banyak Kabupaten/Kota yang nilai Indeks RB dibawah kategori Baik. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus terkait kondisi tersebut.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai ditahun 2023 sebesar 66,42 (B) dengan capaian sebesar 110,7%.

5.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.30
Perbandingan antara realisasi kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	52,21 (CC)	66,42 (B)	CC	B (66,42)*	110,7%*

**realisasi tahun 2023*

Berdasarkan table di atas, capaian realisasi indeks reformasi birokrasi setiap tahun meningkat. Tahun 2022 realisasi indek RB mendapat predikat CC, namun peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan predikat B. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya perubahan nomenklatur pada Reformasi Birokrasi dan juga adanya dukungan terhadap peningkatan nilai Indeks RB dengan komponen kinerja utama yang mendukung antara lain Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Arsiparis, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks BerAkhlak, Nilai AKIP, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Nilai Sistem Kerja.



5.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.31**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir 2026**

Indikator	Tahun 2024			Target 2026
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B (66,42)*	110,7%*	B

**realisasi tahun 2023*

Pada tabel di atas, sebagai perbandingan terhadap target akhir RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan proyeksi capaian kinerja 100% terhadap realisasi pada tahun 2023.

5.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.32**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator	Kabupaten Muba	Nasional	Gap
	Tahun 2024	Tahun 2024	
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	

Secara Nasional, nilai Indeks RB ditentukan dengan rata-rata capaian Indeks RB pada masing-masing Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian predikat “Baik”. Jika diproyeksikan dengan realisasi Indeks RB Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Indeks RB Kabupaten Musi Banyuasin dikategorikan selaras dengan realisasi pada tingkat nasional.

5.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut disebabkan oleh indikator-indikator mikro yang mendukung peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Opini BPK RI terhadap LKPD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Nilai SAKIP

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tahun 2022 s/d 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	2022	BB (70)	B (65,99)	94,27 %
	2023	BB (70)	B (67,59)	96,5%
	2024	BB (70)	B (69,07)	98,67%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut dengan SAKIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Selama kurun waktu 3 Tahun terakhir (tahun 2022-2024) Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang meningkat.

Tahun 2022 Nilai SAKIP mendapat nilai 65,99 (Predikat B) lalu meningkat menjadi 67,59 (Predikat B) pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 Nilai SAKIP Kab. Musi Banyuasin naik sebesar 69,07 dengan Predikat B. Dilihat dari perbandingan target dan capaian tahun 2022 sebesar 94,27%, tahun 2023 sebesar 96,5%, dan tahun 2024 sebesar 98,67%.

b. Opini Terhadap Laporan Keuangan PEMDA

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
2. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Adapun komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini BPK secara bertingkat terdiri dari :

1. Tidak Wajar (TW);
2. Tidak Memberikan Pendapat (TMP);
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perhitungan capaian Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA menggunakan rumus sebagai berikut :

Opini BPK atas Laporan Keuangan PEMDA

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	Predikat	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP

Dari Tabel di atas dapat dilihat berdasarkan presentase perangkat daerah yang memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda pada tahun 2024 **belum diterimanya** hasil evaluasi dari pemeriksaan BPK RI, sementara pada tahun



2023 memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda dengan predikat **WDP** (Wajar Dengan Pengecualian). Jika di lihat dari 2 tahun terakhir Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda masih **belum** mencapai target yang ditetapkan BPK RI.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

- Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- Adanya permasalahan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya;
- Adanya Kerugian Daerah yang belum dipulihkan (kasus yang sudah terbit SKTJM); dan
- Lemahnya sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah dan akuntansi masih lemah.

b) Faktor Pendukung dalam Pencapaian Kinerja

- Melakukan perbaikan target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- Melakukan perbaikan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya; dan
- Melakukan evaluasi dan monitoring dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan;

c) Solusi

- Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan *cascade down* agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan;
- Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

**c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tabel 3.35
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 s/d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	2022	90	88,54	98,38
		2023	91	88,69	97,46
		2024	92	88.79	96.51

Pada Tahun 2024, semuanya unit kerja sudah melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat dan UPP sudah mulai berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil dari survei tersebut. Setiap Unit Penyelenggara Pelayanan dengan cepat menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dimana mereka harus melakukan perbaikan terhadap unsur terkecil pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Core Values ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88.79 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan sudah Sangat Baik. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan secara konsisten di seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan. Beberapa faktor pendorong dan penghambat serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM sebagai berikut:

Beberapa faktor pendorong maupun menghambat serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM adalah sebagai berikut:

**Faktor pendorong:**

1. Adanya Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan agar mempermudah masyarakat penerima manfaat layanan.
2. Sudah membaiknya sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti ruang menyusui, tempat bermain anak, pojok ASI, ruang pelayanan yang nyaman dan berpihak pada masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti difabel, lansia dan ibu hamil.

Faktor penghambat:

- 1 Penerapan dan penguasaan teknologi informasi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin masih terbatas karena tidak semua wilayah dan masyarakat bisa disentuh oleh pelayanan yang berbasis teknologi Informasi.
- 2 Kualitas SDM Pelayanan masih belum berorientasi pelayanan, karena Belum Semua Perangkat Daerah Melakukan Inovasi Pelayanan. Sehingga waktu penyelesaian pelayanan masih belum optimal. Selain itu beberapa Unit Penyelenggara pelayanan masih belum memiliki kualitas petugas layanan yang baik berdasarkan 5 S sehingga perlu dilakukan pelatihan terhadap petugas layanan.
- 3 Dibeberapa unit pelayanan masih sangat terbatas sarana prasarana pelayanan terutama untuk kelompok rentan seperti Wanita hamil, menyusui, lansia, anak-anak dan kelompok difabel. Khususnya perangkat daerah yang belum dilakukan evaluasi oleh kementerian dan Ombudsman.

Beberapa langkah kongkrit yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat sebagai berikut:

1. Diberbagai Pelayanan Kesehatan ada pelayanan PSC 119 “SIRENE MUBA” yang mengintegrasikan layanan gawat darurat medis atau non gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tepat, terkoordinir dan akuntabel kedalam suatu sistem informasi berbasis android dengan cara memencet *emergency button*. Ada beberapa fitur baru home care sampai ke tingkat desa, fitur Covid-19 untuk rujukan pasien atau info tentang jumlah kasus Covid-19, fitur bus tayo untuk fasilitasi rujukan rawat jalan dan fitur jika MUBA sebagai media konsultasi



masyarakat. Dimana “SIRENE MUBA” telah menjadialah satu TOP 5 kategori replika pada sinovik tahun 2021 dan terus di kembangkan agar masyarakat bisa berkonsultasi secara langsung melalui Radio Gema Randik dengan para dokter yang tentang pengetahuan berbagai penyakit dan pencegahannya.

2. Dibidang Pelayanan Administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai inovasi administrasi kependudukan langsung jadi (KELADI) dan dibantu dengan menyediakan mesin pencetak otomatis identitas kependudukan, atau yang disebut mesin Anjungan Dukcapil Mandiri dan sudah tersebar di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sanga Desa.
3. Dalam waktu dekat akan dibangun mall pelayanan Publik yang dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan dan terjangkau.
4. Penerapan *One Agency One Innovation*, dimana masing-masing Perangkat Daerah harus memiliki inovasi pelayanan sehingga penyelenggara pelayanan dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.
5. Melakukan Sistem “Jemput Bola” untuk pelayanan yang sifatnya krusial seperti data kependudukan, pendidikan, dan kesehatan di wilayah-wilayah yang sulit diakses ataupun masih terisolir.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan pada setiap UPP dalam melayani masyarakat dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, administrasi kependudukan dan kesehatan. Beberapa inovasi yang telah diterapkan seperti Inovasi Saji Muba, lazada, lakso, SMART DUKCAPIL, Inovasi Banak Mude, SALI Temannya Upin, dll.

Adapun program yang mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ada beberapa program antara lain ; Program penunjang urusan pemerintah daerah. Dan ada beberapa juga program yang mendukung capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik yang mana ini mendukung darinilai indeks kepuasan masyarakat, diantaranya program aplikasi informatika, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pelayanan penanaman modal.

**d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penerapan SPBE memiliki empat jenis layanan, yaitu :

1. *Government to Citizen* (G2C) merupakan sistem pemerintahan bertujuan untuk menciptakan layanan optimal kepada masyarakat antara lain seperti pajak *online*, lowongan pekerjaan, kesehatan, kependudukan, hingga penanggulangan bencana.
2. *Government to Bussiness* (G2B) merupakan layanan transaksi elektronik bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi antara pemerintah dan dunia usaha, seperti *e-procurement*, pajak perseroan, peluang bisnis, dan pendaftaran perusahaan.
3. *Government to Government* (G2G) merupakan layanan sistem informasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi kinerja pemerintah menghubungkan institusi pemerintahan dengan data terintegrasi yang diterapkan untuk beberapa proses bisnis pemerintahan, seperti perencanaan dan penganggaran serta layanan data dan informasi pembangunan. “integrasi tersebut sangat diperlukan untuk memberikan data akurat dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat dan dunia usaha.
4. *Government to Employee* (G2E) merupakan layanan sistem informasi yang bertujuan Tidak hanya kepada para masyarakat saja, Government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan.

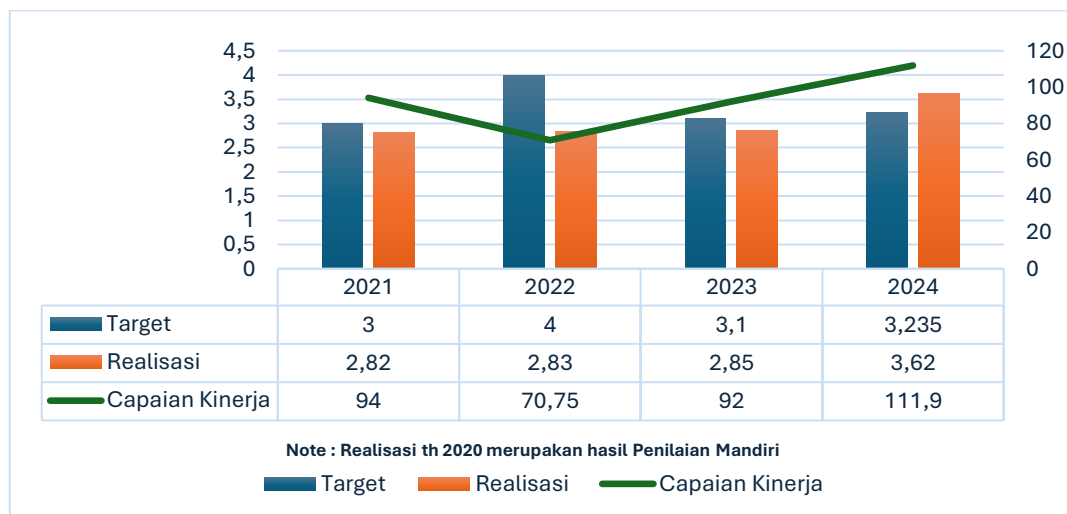


Pemerintah pusat menjadikan SPBE sebagai platform, hal inilah menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menuangkan dalam RPD tahun 2023 - 2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, dengan salah satu *entry pointnya* adalah menjadikan SPBE sebagai salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Kabupaten.

Sedangkan capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Musi tahun 2019 hasil evaluasi dari evaluator eksternal Kemenpan RB sebesar 2,11 sedangkan untuk tahun 2020 hasil evaluasi dari evaluator internal sebesar 2,77, untuk capaian tahun 2021 berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 1503 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar 2,83, capaian kinerja indeks SPBE kabupaten musu banyuasin pada tahun 2023 hasil evaluator sebesar 2,85 dan pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian evaluasi oleh assesor dari kemenpan RB sebesar 3,62 seperti grafik di bawah ini:

Gambar 3.15

Target, Realisasi dan Capaian SPBE di Kabupaten Musi Banyuasin

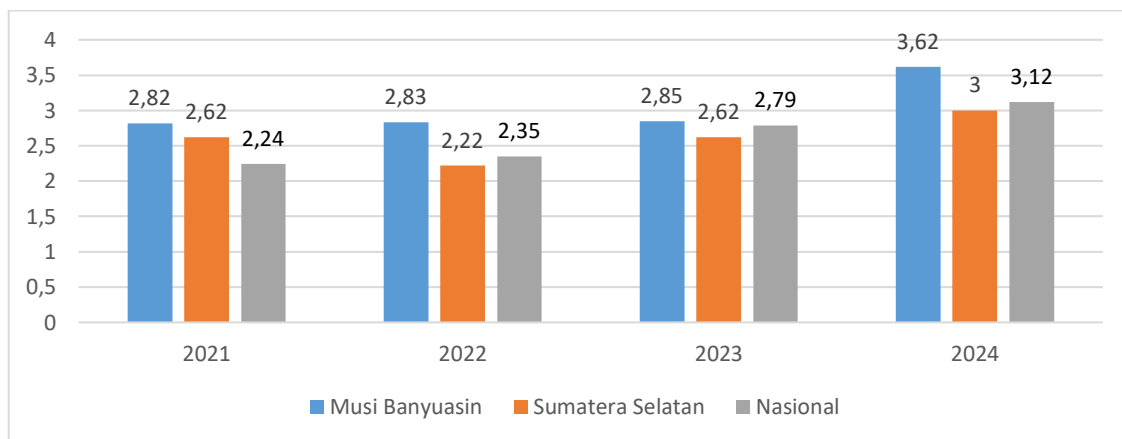


Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:



NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Gambar 3.16
Capaian Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan serta Nasional



Faktor Pendorong:

1. Dari sisi Domain Kebijakan telah memiliki kebijakan terkait arsitektur, peta rencana, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, manajemen keamanan informasi, dan audit TIK. Kebijakan tersebut telah cukup matang hal itu tertuang dalam laporan hasil evaluasi serta pembangunan aplikasi SPBE yang menjadi keunggulan utamanya.
2. Dari sisi Domain Tata kelola SPBE Rencana dan anggaran SPBE telah matang dan sangat baik, itulah yang menandakan keunggulan dalam perencanaan strategis, Layanan pusat data, jaringan intra instansi, dan sistem penghubung



layanan instansi serta tim Koordinasi SPBE telah sangat baik hal itulah yang menunjukkan keunggulan dalam aspek TIK.

3. Dari Sisi Domain Manajemen SPBE Tim Koordinasi SPBE telah matang sehingga menunjukkan efektivitas dalam koordinasi dan penerapan manajemen SPBE.
4. Dari sisi domain layanan SPBE Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, dan Kearsipan pada indikator ini sudah sangat baik sehingga menunjukkan bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Musi Banyuasin telah matang dan efektif dalam berbagai aspek. Tingkat kematangan Layanan Kinerja pegawai, Pengaduan pelayanan publik, Layanan Publik Sektoran sudah sangat baik.

Faktor Penghambat

1. Dari sisi Domain Kebijakan SPBE terdapat beberapa kebijakan terkait manajemen data, pengoperasian jaringan intra instansi, sistem penghubung layanan, dan tim koordinasi SPBE yang belum optimal sehingga perlu ditingkatkan.
2. Dari sisi Domain Tata Kelola SPBE terdapat beberapa pembangunan aplikasi SPBE yang perlu ditingkatkan lagi dan dilakukan pengembangan terhadap aplikasi khususnya pada aplikasi pelayanan. Kolaborasi antar instansi atau unit dalam penerapan SPBE masih kurang sehingga perlu adanya kesadaran OPD dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tata kelola dalam penerapan dan pengembangan SPBE masih belum optimal serta Pembangunan TIK di masing-masing PD masih dilakukan secara parsial dan belum terkoordinasi. Pembangunan TIK dilakukan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif masing-masing PD sehingga terjadi tumpang tindih antar aplikasi.

3. Dari sisi Domain Manajemen SPBE pada area manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE, Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan audit



tersebut.

4. Dari sisi Domain Layanan SPBE dari tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara, pengawasan internal terkait pemerintah, dan akuntabilitas kinerja organisasi sebenarnya sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan dan dioptimalisasikan lagi.
5. Proses layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK belum terintegrasi karena masih belum berorientasi pada pihak penerima layanan. Selain itu, pemanfaatan TIK tidak diimbangi dengan penataan ulang proses-proses layanan serta penerapan manajemen perubahan pada organisasi. Perubahan Kebijakan dan dinamika yang terus berkembang serta kemajuan TIK sangat pesat dan cepat membuat *hardware, software dan brainware* menjadi cepat usang sehingga membutuhkan pemutakhirnya secara berkala.
6. Infrastruktur TIK yang dimiliki belum memadai untuk penerapan SPBE yang terintegrasi dan pengadaan infrastuktur masih dilakukan secara parsial dan belum mempunyai standar sehingga masing-masing infrastuktur yang dimiliki beresiko tidak dapat berinteraksi satu dengan yang lain.
7. Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkompeten di bidang TIK dan auditor di bidang TIK masih terbatas.

Upaya yang telah di lakukan

Dalam penerapan SPBE ada berbagai permasalahan yang dihadapi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya tersebut dapat dicapai dengan adanya sinergisitas antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Dari sisi kebijakan dan tata kelola SPBE beberapa kebijakan telah diterbitkan diantaranya:



- a. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor: 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Telah dibentuk tim koordinasi SPBE dengan Keputusan Bupati nomor: 220/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. Telah disusunnya Dokumen Arsitektur SPBE nomor 606/KPTS-DINKOMINFO/2023 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
 - d. Telah disusunnya Dokumen Peta Rencana SPBE Nomor : 617/Kpts-Bappeda/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026
 - e. Telah disusunnya dokumen Pedoman (standar) Sumber Daya TIK Kabupaten Musi Banyuasin keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 782/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang standar sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai kebijakan SPBE yang terpadu.
 - f. Telah disusunnya dokumen Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: /07 /KPTS-DINKOMINFO/2023 tentang pembentukan tim tanggap insiden siber (*computer security incident response team* kabupaten Musi Banyuasin.
 - g. Telah disusunnya Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 36 tahun 2023 tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten musu banyuasin.
 - h. Telah disusunnya Perjanjian Kerja Sama antara dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan direktorat operasi keamanan siber deputy bidang operasi keamanan siber dan sandi badan siber dan sandi negara Nomor 300/221/PKS/DINKOMINFO/P/2023 tentang pengelolaan informasi dini serangan siber berupa pemanfaatan perangkat honeypot.
2. Dari sisi Layanan SPBE yang merupakan inti dari penerapan SPBE karena definisi dari SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan peningkatan kualitas layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi dan berkesinambungan. Adapun jenis layanan yang telah dibangun, adalah :



- a. Tersedianya layanan wifi publik pada 10 titik di Kecamatan Sekayu.
- b. Tersedianya layanan CCTV sebanyak 21 titik di Kecamatan Sekayu, Babat Toman, Sungai Lilin dan Bayung Lencir. Untuk layanan CCTV masih diperlukan penambahan lagi karena Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 15 Kecamatan.
- c. Layanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik di Musi Banyuasin sudah tergabung di dalam Pusat Data Nasional.
- d. Standar Keamanan Informasi telah mendapatkan sertifikasi **ISO 27001:2022** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. Layanan hosting website dan aplikasi resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk dapat menampung semua PD agar melakukan layanan hosting terpusat maka di perlukan penambahan dan perbaikan infrastruktur TIK terutama pada data center.
- f. Saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memanfaatkan fasilitas Pusat Data Nasional pada tahun 2023 untuk menunjang efektifitas pada aplikasi yang terintegrasi.
- g. Tersedianya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Musi Banyuasin yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.
- h. Dimasa pandemi *Covid-19* ini Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan fasilitasi rapat secara virtual.
- i. Terbangunnya layanan yang terintegrasi/berbagi pakai data dalam hal ini adalah Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin telah dimanfaatkan oleh 5 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang disetujui hak aksesnya oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, BPPRD dan DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin. Untuk kedepan agar semua layanan dapat terintegrasi maka perlu dibangun sistem layanan penghubung dan koordinasi dari PD ke Dinkominfo apabila akan mengembangkan atau membangun aplikasi.



3. Untuk infrastruktur SPBE di berbagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin yang dihubungkan dengan Jaringan Fiber Optik yang difasilitasi bandwidth dari Dinas Komunikasi dan Informatika. pembangunan/pengembangan infrastruktur SPBE di 9 Perangkat Daerah (sumber data dari BPKAD Kab. Muba).

Sedangkan infrastruktur SPBE yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- Jaringan Internal Kantor Dinkominfo secara lokal.
 - Tersedianya 7 titik wifi di kantor Dinkominfo dan 8 titik wifi publik di Kecamatan Sekayu. Untuk menuju *smart regency/city* layanan publik wifi diperlukan penambahan titik-titik wifi pada area publik yang ada.
 - Tersedianya bandwidth sebesar 4000 Mbps. Bandwidth tersebut digunakan untuk memberikan layanan publik yang merata, ada 58 OPD di Kabupaten Musi Banyuasin dan saat ini sudah difasilitasi seluruh internet terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Memiliki 1 unit *command centre*. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang maka perangkat pada *command centre* perlu untuk dilakukan pembaharuan.
4. Jumlah Aplikasi SPBE yang telah dibangun / dikembangkan sebanyak 100 aplikasi pada 40 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan kondisi aktif sebanyak 66 aplikasi, kondisi sedang perbaikan sebanyak 6 aplikasi dan kondisi tidak aktif sebanyak 28 aplikasi. pembangunan aplikasi SPBE pada tahun 2020 untuk 12 aplikasi di 7 Perangkat Daerah sedangkan pemeliharaan aplikasi SPBE untuk 11 aplikasi di 9 Perangkat Daerah dan Belanja internet di 36 Perangkat Daerah (sumber data dari BPKAD Kab. Muba). Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk menyokong berbagai kegiatan pemerintahan, terlihat bahwa selain dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, aplikasi-aplikasi tersebut juga dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang berbeda. Artinya, data yang tersimpan dan digunakan oleh aplikasi tersebut sangat beraneka ragam. Umumnya, hanya instansi pengembang aplikasi yang akan mendapatkan hak eksklusif terhadap data tersebut. Maka perlu suatu langkah khusus guna memastikan tidak terulangnya hal-hal semacam ini dikemudian hari.

**Analisis Kesenjangan SPBE**

Analisis kesenjangan pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Musi Banyuasin mengungkap berbagai area di mana kondisi eksisting belum mencapai kondisi ideal :

Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran untuk penerapan serta pengembangan SPBE belum terlaksana secara ideal.
2. Aspek seperti Manajemen Data, Keamanan Informasi, Risiko, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan membutuhkan pengembangan kebijakan internal yang lebih rinci dan terperinci. Implementasi di berbagai perangkat daerah belum merata.
3. Belum optimalnya tata kelola penerapan SPBE.
4. Terdapat gap dalam tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi kebijakan seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan lainnya. Implementasi kebijakan ini belum optimal, dan belum ada penyesuaian yang cukup terhadap perubahan lingkungan atau teknologi.
5. Proses layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK belum optimal serta Terdapat kekurangan dalam optimalisasi layanan Pusat Data dan Jaringan Intra serta dalam integrasi Sistem Penghubung Layanan dengan tingkat nasional. Diperlukan peningkatan untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas layanan.
6. Infrastruktur TIK yang dimiliki belum memadai untuk penerapan SPBE yang terintegrasi.
7. Kemampuan TIK Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin utamanya Dinkominfo masih sangat terbatas
8. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memiliki auditor dengan kualifikasi di bidang TIK.



Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antar Perangkat Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Rencana tindak lanjut dalam penerapan SPBE dijabarkan ke dalam 5 (lima) area, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran

Clearance anggaran TIK dalam kegiatan perencanaan dengan melakukan *asesment* bersama Dinkominfo dan TAPD agar dapat mewujudkan penganggaran yang efisien. Dalam perencanaan dan penganggaran TIK agar berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

2. Manajemen dan Tata Kelola SPBE

Manajemen dan Tata Kelola SPBE diarahkan untuk menunjang dan meningkatkan pengelolaan SPBE agar tercapainya manajemen dan tata kelola yang baik melalui :

- a. Penyesuaian kebijakan tentang Manajemen Data, Keamanan Informasi, Risiko, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan secara terperinci serta penerapan di seluruh Perangkat Daerah.
- b. Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE serta kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui kebijakan dan sinergisitas antar PD, dalam kebijakan tersebut diperlukan peran Dinkominfo dengan melakukan *asssesment* dalam pengembangan dan pembangunan TIK.
- c. Penyesuaian dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE melalui kegiatan *reviu* dan evaluasi dokumen tersebut.



3. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui :

- a. Menjamin pelayanan yang berkesinambungan dengan didukung oleh infrastruktur yang baik dan terpusat;
- b. Mengelola Data menjadi valid dan akurat.

4. Infrastruktur TIK

Penyelenggaraan TIK harus didukung oleh infrastruktur TIK, termasuk didalamnya aplikasi SPBE yang diarahkan untuk pengintegrasian TIK. Hal ini dapat dicapai melalui :

- a. Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya infrastruktur baik dengan dana APBD atau melalui pendanaan lainnya;
- b. Menyediakan sistem layanan penghubung;
- c. Melakukan test sistem keamanan;
- d. Melakukan Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan; dan
- e. Mengelola fasilitas yang ada dengan maksimal.

5. Sumber Daya Manusia SPBE

Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkompeten di bidang TIK masih terbatas, untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK dapat dilakukan melalui :

- a. Melakukan *recruitment* SDM dibidang TIK;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat dan bimtek.



DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SPBE



Sosialisasi Aplikasi E-Office ASN dan Desa di seluruh Kecamatan



SPBE

DOKUMENTASI PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE



Penyusunan dokumen arsitektur SPBE bersama dengan TIM
kemenpan RB



*Standar Keamanan Informasi telah tersertifikasi audit ISO 27001 pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin*



LKjIP

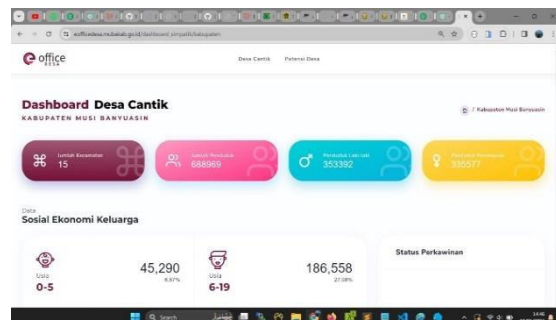
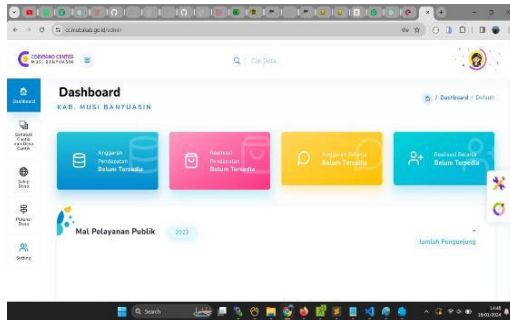
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024





SPBE

DOKUMENTASI PENYEDIAAN AKSES WIFI PUBLIK



Penyediaan wifi publik di beberapa titik di kota sekayu

Dasboard command centre dan dasboard desa cantik



5.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024, beberapa program dan kegiatan telah diimplementasikan. Berikut adalah analisis terhadap inisiatif-inisiatif tersebut:

1. Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyesuaian Sistem Kerja

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan ini mencakup penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah dengan meraih penghargaan pelayanan publik berkualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada tahun 2024. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

3. Kolaborasi dengan Ombudsman RI untuk Pencegahan Maladministrasi

Untuk mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjalin kolaborasi dengan Ombudsman RI. Kerja sama ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka meningkatkan manajemen ASN, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Daerah Jawa



Barat. Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem merit berbasis kompetensi, kualifikasi, dan keahlian, yang nantinya akan diterapkan di Musi Banyuasin untuk meningkatkan profesionalisme ASN.

5. Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengkaji dan menerapkan sistem merit berbasis kompetensi, kualifikasi, dan keahlian dalam manajemen ASN. Langkah ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, sehingga berdampak positif pada pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Dengan implementasi program dan kegiatan tersebut, diharapkan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dapat meningkat secara signifikan, mencerminkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**3.3. ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER
DAYA**

Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp.)			%	ket
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Angka Kemiskinan	14,35	12,88	110,24	455.267.454.092	352.259.295.296	77,37%	142,48	Efektif dan Efisien
Pertumbuhan Ekonomi	4,00 - 4,50	4,94	109,77	186.183.046.217	146.253.361.446	78,55	139,74	Efektif dan Efisien
Indeks Pelayanan Infrastruktur	91,15	80,55	88,37	1.157.371.237.429	710.145.662.614	61,36	144,01	Efektif dan Efisien
Indeks Pembangunan Manusia	69,17	72,27	104,48	1.787.124.728.368	1.537.517.691.832	86,03	121,44	Efektif dan Efisien
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB (73,49)	122,48	1.504.015.744.634	1.301.336.376.448	86,52	141,56	Efektif dan Efisien

Berdasarkan informasi yang tertuang pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja utama pemerintah kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup efektif secara kinerja dan efisien dalam penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Penurunan Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Reformasi Birokrasi.



3.4. CAPAIAN KINEJA LAINNYA



Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Bhumandala Award Tahun 2024. Kali ini, Muba mendapatkan Bhumandala Rajata (Medali Perak) dalam kategori Kabupaten Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan IG. Penghargaan ini melengkapi keberhasilan Muba yang sebelumnya juga meraih Bhumandala Award, yakni Bhumandala Rajata pada 2020 dan Bhumandala Ariti tahun 2022. Tahun 2024 ini, Muba kembali meraih Bhumandala Rajata. Penghargaan ini diserahkan langsung Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Dr. Antonius Bambang Wijanarto, di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin (4/11) malam, di Grand Studio Metro TV, Citra Media Nusa Purnama, di Jakarta Barat

Kabupaten Musi Banyuasin mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten dengan Predikat Perak. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan diterima langsung Pj Bupati MUBA, H Sandi Fahlepi, diserahkan oleh Wamen I mendagri Ribka Haluk, disaksikan oleh Menteri Menteri Kebudayaan RI, Dr Fadli Zon dan Wakil Menteri Kebudayaan H. Giring Ganesha Djumaryo dalam acara yang berlangsung di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).





Pejabat Bupati (Pj) Muba H Sandi Fahlepi didaulat menjadi Sahabtu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (10/6/2024).

Berhasil pertahankan UHC, 97.88 Persen Warga Muba Terlindungi JKN. Dinilai Sukses mendukung program jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



PT Petro Muba teriima penghargaan *Outstanding Social Empowerment* di ajang bergengsi CNN Indonesia Awards Sumsel 2024. Acara bergengsi yang bertajuk "Dari Bumi Sriwijaya, Merangkai Masa Depan Nusantara" ini berlangsung di Palembang, Rabu malam (10/7/2024).

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) atas keberhasilan dalam program penurunan stunting melalui inovasi Bunda AS. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel kepada Penjabat (Pj) Bupati Muba, H Sandi Fahlepi, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, di Hotel Novotel Palembang, Selasa (30/4/2024).





Bukti pelayanan publik semakin baik, serta sukses mengimplementasikan praktik *good governance* secara efektif, Pemkab Musi Banyuasin dibawah komando Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi diganjar penghargaan *Best Commitment to Improving Employment Social Security*, dan *Best Disaster & Crisis Management* diajang bergengsi CNN Indonesia Awards Sumsel 2024.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.743.519.048.507,58,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 3.754.985.496.957,10 atau sebesar 72,46%. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 3.36

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.993.501.621.876,58	1.695.209.382.253,80	80,26
Program Pengelolaan Pendidikan	250.788.425.862,00	225.892.889.815,00	90,07
Program Pengembangan Kebudayaan	4.669.411.500,00	3.684.156.660,00	78,90
Program Pembinaan Sejarah	372.000.000,00	271.850.000,00	73,08
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	380.380.000,00	249.621.494,00	65,62
Program Pengelolaan Permuseuman	1.478.016.000,00	1.370.273.000,00	92,71
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.764.171.500,00	4.925.065.750,00	72,81
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	140.192.341.542,00	134.442.029.185,00	95,90
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.513.944.100,00	1.321.967.436,00	52,59
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	478.677.000,00	285.431.579,00	59,63
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	632.705.953,00	535.618.305,00	84,66



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.000.000.000,00	10.469.956.237,00	74,79
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.484.145.000,00	2.108.119.518,00	60,51
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.843.846.317,00	2.816.778.466,00	99,05
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	794.900.000,00	310.335.879,00	39,04
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15.600.000,00	14.900.000,00	95,51
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	955.745.000,00	602.689.851,00	63,06
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	844.767.000,00	448.071.259,00	53,04
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	793.094.150,00	551.807.210,00	69,58
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	30.975.000,00	30.000.000,00	96,85
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	809.326.356,00	609.155.478,54	75,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	40.231.724,00	40.080.000,00	99,62
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	723.443.068,00	407.954.036,00	56,39
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	21.915.932,00	11.670.000,00	53,25
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	765.257.006,00	617.614.263,00	80,71
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.831.724,00	34.600.000,00	99,33
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	896.319.390,00	397.125.005,00	44,31
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	841.140.000,00	471.225.158,00	56,02
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	813.779.276,00	474.359.606,00	58,29
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.831.724,00	9.600.000,00	88,63



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	823.723.068,00	400.497.858,00	48,62
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	68.404.702,00	0	0,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.085.732.580,00	693.132.007,00	63,84
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	893.564.068,00	519.638.052,00	58,15
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	13.164.932,00	13.140.000,00	99,81
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	607.126.068,00	312.347.207,00	51,45
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.935.932,00	0	0,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	747.677.250,00	355.373.000,00	47,53
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15.144.000,00	14.096.000,00	93,08
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	791.620.850,00	492.980.528,00	62,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.931.700,00	12.750.000,00	98,59
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	787.787.000,00	432.493.807,00	54,90
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	16.200.000,00	11.250.000,00	69,44
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	516.419.150,00	337.879.326,00	65,43
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	452.770.150,00	245.884.419,00	54,31
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.800.000,00	2.500.000,00	89,29
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	832.177.860,00	558.486.445,00	67,11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.632.000,00	0	0,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	818.946.000,00	376.859.344,00	46,02
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	993.692.560,00	608.368.891,00	61,22



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	22.724.000,00	15.199.000,00	66,89
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	787.443.320,00	591.892.056,00	75,17
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.212.000,00	10.212.000,00	100,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	869.686.000,00	632.871.575,00	72,77
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	60.750.000,00	60.078.000,00	98,89
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	869.053.800,00	692.014.908,00	79,63
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.116.000,00	10.116.000,00	100,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	754.306.812,00	346.715.264,00	45,96
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.400.000,00	10.800.000,00	75,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	643.714.000,00	282.555.000,00	43,89
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	871.840.110,00	548.275.591,00	62,89
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	594.986.748,00	259.329.511,00	43,59
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.809.990,00	5.200.000,00	66,58
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	73.922.354.785,00	48.243.375.288,00	65,26
Program Penyelenggaraan Jalan	810.929.239.102,00	469.851.506.933,00	57,94
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	328.550.000,00	3.562.000,00	1,08
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.223.460.000,00	1.112.452.602,00	34,51
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	23.515.058.850,00	13.566.620.379,00	57,69
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.866.220.073,00	14.191.210.400,00	64,90
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	32.951.850.844,00	28.822.158.250,00	87,47
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	18.498.859.934,00	8.195.386.050,00	44,30
Program Penataan Bangunan Gedung	108.325.451.726,00	77.816.435.570,00	71,84
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	929.492.000,00	344.669.693,00	37,08



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan Perumahan	18.392.951.520,00	13.938.894.950,00	75,78
Program Kawasan Permukiman	323.400.000,00	227.951.811,00	70,49
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	30.186.386.400,00	26.973.900.000,00	89,36
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	62.163.043.810,00	36.825.846.950,00	59,24
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	85.550.000,00	0	0,00
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	8.489.853.959,00	3.411.348.515,00	40,18
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.992.653.000,00	1.987.003.412,00	99,72
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	81.466.237.780,00	81.234.683.373,00	99,72
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95.019.000,00	85.343.791,00	89,82
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	243.646.000,00	223.117.930,00	91,57
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	511.416.500,00	376.685.483,00	73,66
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.229.502.161,00	6.343.654.239,00	87,75
Program Penanggulangan Bencana	486.308.500,00	441.649.500,00	90,82
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	863.563.000,00	765.364.000,00	88,63
Program Penanggulangan Bencana	4.747.147.962,00	3.518.676.466,00	74,12
Program Pemberdayaan Sosial	4.022.744.460,00	3.250.779.269,00	80,81
Program Rehabilitasi Sosial	8.654.575.960,00	5.050.536.973,00	58,36
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	50.827.076.342,00	20.954.223.272,00	41,23
Program Penanganan Bencana	1.009.169.000,00	1.002.710.365,00	99,36
Program Perencanaan Tenaga Kerja	424.469.100,00	359.136.700,00	84,61
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.841.901.000,00	2.520.754.279,00	43,15
Program Penempatan Tenaga Kerja	880.581.660,00	408.500.677,00	46,39
Program Hubungan Industrial	1.026.608.000,00	752.043.785,00	73,26



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	110.096.000,00	106.866.660,00	97,07
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	886.118.900,00	627.182.964,00	70,78
Program Perlindungan Perempuan	325.409.500,00	189.821.002,00	58,33
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	81.805.000,00	0	0,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	536.304.100,00	509.300.760,00	94,96
Program Perlindungan Khusus Anak	989.371.096,00	801.716.178,00	81,03
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.970.095.788,00	3.310.926.041,00	83,40
Program Penanganan Kerawanan Pangan	75.397.611,00	41.977.317,00	55,67
Program Pengawasan Keamanan Pangan	159.819.850,00	127.503.400,00	79,78
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	255.999.000,00	205.026.029,00	80,09
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.793.315.769,00	2.490.554.260,00	89,16
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.141.274.720,00	1.604.887.271,00	74,95
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	224.311.000,00	167.099.268,00	74,49
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	23.508.000,00	10.453.300,00	44,47
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	109.937.000,00	75.646.160,00	68,81
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	101.146.000,00	72.272.700,00	71,45
Program Pengelolaan Persampahan	9.988.689.760,00	7.831.555.659,00	78,40
Program Pendaftaran Penduduk	992.016.149,00	834.783.146,00	84,15
Program Pencatatan Sipil	324.561.120,00	270.720.388,00	83,41
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.982.945.775,00	3.851.440.597,00	96,70
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.208.223,00	46.109.504,00	91,84
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	154.173.299,00	68.710.109,00	44,57
Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.822.521.565,00	5.081.450.152,00	74,48



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.335.401.825,00	2.570.860.238,00	77,08
Program Pengendalian Penduduk	525.962.000,00	369.091.620,00	70,17
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.366.113.971,00	3.133.328.516,00	71,76
Promosi Dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.346.570.869,00	3.250.920.808,00	97,14
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.641.106.873,00	3.316.393.783,00	91,08
Program Pengelolaan Pelayaran	833.644.762,00	689.303.288,20	82,69
Program Pengelolaan Penerbangan	119.982.200,00	62.331.196,00	51,95
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	9.791.837.552,00	8.084.907.853,00	82,57
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.415.736.718,00	2.713.819.877,00	36,60
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.248.087.368,00	596.354.615,00	47,78
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.798.503.243,00	184.011.912,00	10,23
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	327.334.800,00	287.358.058,00	87,79
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	188.062.900,00	179.309.804,00	95,35
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	324.754.400,00	300.190.200,00	92,44
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	399.939.300,00	371.024.100,00	92,77
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	405.943.200,00	370.261.687,00	91,21
Program Pengembangan Umkm	6.307.797.180,00	2.566.072.600,00	40,68
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	329.256.750,00	158.491.651,00	48,14
Program Promosi Penanaman Modal	594.455.000,00	553.054.113,00	93,04
Program Pelayanan Penanaman Modal	1.036.313.555,00	720.912.091,00	69,57
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	816.195.500,00	663.980.507,00	81,35
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	123.298.900,00	109.104.870,00	88,49
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.447.883.000,00	1.207.373.606,00	83,39



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	40.509.465.425,00	34.061.225.639,00	84,08
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.109.430.440,00	2.778.382.535,00	89,35
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.830.410.000,00	1.817.182.620,00	99,28
Program Pemasaran Pariwisata	1.444.904.183,00	836.300.012,00	57,88
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	105.776.281,00	89.797.300,00	84,89
Program Pembinaan Perpustakaan	2.444.058.284,00	1.679.835.238,00	68,73
Program Pengelolaan Arsip	669.204.437,00	429.230.455,00	64,14
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.832.773.400,00	3.392.703.853,00	88,52
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.380.485.512,00	5.279.241.075,00	82,74
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.143.557.500,00	1.016.966.214,00	88,93
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.208.161.800,00	2.047.409.825,00	92,72
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	107.564.072,00	63.918.694,00	59,42
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.122.077.901,00	9.180.220.771,00	82,54
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.531.443.749,00	2.438.213.866,00	96,32
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.012.105.516,00	740.308.437,00	73,15
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	273.199.000,00	218.713.930,00	80,06
Program Penyuluhan Pertanian	3.437.980.026,00	2.684.044.100,00	78,07
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.765.000,00	96.336.518,00	47,98
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.159.690.550,00	6.285.781.871,00	87,79
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	26.142.348.594,00	25.175.766.505,00	96,30
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.788.503.055,00	12.617.050.011,00	85,32
Program Perizinan Usaha Pertanian	253.528.000,00	165.742.179,00	65,37
Program Penyuluhan Pertanian	3.118.902.800,00	2.075.886.506,00	66,56
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	165.071.000,00	70.141.600,00	42,49
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	17.461.718.516,00	16.584.579.030,00	94,98



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.109.989.500,00	625.526.100,00	56,35
Program Pengembangan Ekspor	4.344.187.200,00	4.184.569.100,00	96,33
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	213.697.000,00	195.839.000,00	91,64
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	217.015.000,00	210.550.500,00	97,02
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.356.537.609,00	2.234.176.750,00	94,81
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	60.976.000,00	41.890.000,00	68,70
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.414.000,00	20.595.000,00	47,44
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	35.805.726.942,00	24.637.031.223,00	68,81
Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.339.418.660,00	1.941.633.894,00	83,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	46.607.747.949,00	35.142.792.096,00	75,40
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.688.524.045,00	1.421.427.440,00	52,87
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.285.112.300,00	1.114.226.540,00	48,76
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.075.743.050,00	663.224.450,00	61,65
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	544.190.162.451,00	492.450.840.484,00	90,49
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.536.748.410,00	1.076.076.554,00	70,02
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.936.855.136,00	3.189.033.414,60	81,00
Program Kepegawaian Daerah	5.262.148.000,00	4.438.461.962,00	84,35
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.955.126.600,00	2.531.409.413,00	64,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.787.385.800,00	1.329.750.325,00	74,40
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	417.807.101,00	331.022.000,00	79,23
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19.226.520,00	18.280.000,00	95,08
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.500.000,00	23.300.000,00	99,15
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.150.000,00	68.550.000,00	91,22
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	565.164.500,00	385.963.000,00	68,29
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.955.000,00	13.650.000,00	76,02



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.946.500,00	0	0,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.161.300,00	25.170.000,00	52,26
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	570.114.352,00	377.739.200,00	66,26
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.600.000,00	11.855.000,00	94,09
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.600.000,00	11.600.000,00	85,29
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.120.000,00	17.120.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	365.187.000,00	157.488.750,00	43,13
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.700.000,00	7.695.000,00	99,94
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	373.633.612,00	204.441.612,00	54,72
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.440.000,00	12.900.000,00	95,98
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	9.075.000,00	90,75
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.635.000,00	27.435.000,00	58,83
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	455.062.000,00	350.600.500,00	77,04
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.050.000,00	2.360.000,00	33,48
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.050.000,00	0	0,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.100.000,00	0	0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	459.195.980,00	314.950.000,00	68,59
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.990.510,00	5.000.000,00	50,05
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.190.510,00	5.000.000,00	61,05
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.660.510,00	13.550.000,00	99,19
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	566.220.800,00	347.380.000,00	61,35
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.415.000,00	9.685.000,00	84,84
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.375.000,00	8.085.000,00	77,93
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	554.882.000,00	270.161.000,00	48,69



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	588.314.406,00	585.415.700,00	99,51
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.350.000,00	8.200.000,00	98,20
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.230.000,00	13.009.000,00	98,33
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.500.000,00	19.000.000,00	97,44
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	619.376.000,00	451.872.000,00	72,96
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.535.000,00	7.180.000,00	53,05
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.535.000,00	4.080.000,00	30,14
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.280.000,00	30.370.000,00	73,57
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	377.575.000,00	321.431.000,00	85,13
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.392.000,00	20.000.000,00	89,32
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.278.000,00	79.200.000,00	96,26
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	472.686.000,00	439.426.000,00	92,96
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.250.000,00	0	0,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.500.000,00	3.600.000,00	34,29
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	621.500.406,00	464.360.000,00	74,72
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.250.000,00	11.000.000,00	89,80
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.292.000,00	0	0,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.758.000,00	22.401.000,00	64,45
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	569.899.300,00	490.311.000,00	86,03
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.740.000,00	15.228.000,00	73,42
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.345.000,00	14.345.000,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.200.000,00	5.400.000,00	75,00



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	190.688.202,00	174.632.130,00	91,58
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	494.304.600,00	466.707.240,96	94,42
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	170.145.741,00	148.914.077,00	87,52
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	621.629.174,00	448.798.076,00	72,20
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	188.423.072,00	171.891.847,00	91,23
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	582.439.398,00	230.857.293,00	39,64
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	183.045.963,00	180.050.089,00	98,36
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	591.596.776,00	590.466.510,00	99,81
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	87.134.301,00	66.978.653,00	76,87
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	693.988.597,00	361.590.400,00	52,10
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	87.134.301,00	70.185.079,00	80,55
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	689.188.416,00	384.130.400,00	55,74
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	94.782.428,00	90.963.937,00	95,97
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	651.422.911,00	641.882.095,00	98,54
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	92.703.242,00	84.656.077,00	91,32
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	665.220.184,00	616.448.050,00	92,67
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	90.368.664,00	86.590.100,00	95,82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	666.645.041,00	620.501.944,00	93,08
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	97.004.555,00	59.941.350,00	61,79
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	698.030.810,00	695.000.000,00	99,57
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	98.000.000,00	66.194.050,00	67,54
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	696.600.550,00	689.920.000,00	99,04



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024



Program	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	99.993.711,00	91.711.000,00	91,72
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	699.773.525,00	680.294.335,00	97,22
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	99.364.536,00	96.415.186,00	97,03
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	687.173.640,00	679.353.250,00	98,86
Total	4.743.519.048.507,58	3.754.985.496.957,10	72,46

Sumber: Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SIPD



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 3 (tiga) tujuan daerah dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang dihasilkan dari pengukuran dan penilaian kinerja berkualitas telah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai. Kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu merupakan buah dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penetapan kinerja yang rasional dan terukur dengan perencanaan kinerja yang mendasarkan pada problematika daerah secara berkualitas dan penilaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPD dan RKPD 2024, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024



hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisadiakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.